PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA
TAHUN 2023

DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2022

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel ii
Daftar Grafik iii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-4
1.3 Maksud dan Tujuan I-5
1.4 Sistematika Penulisan I-6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 ..... II-7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-11
1. Pencapaian Kinerja Pelayanan II-11
2. Pencapaian Kinerja Keuangan II-29
3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah II-34
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II-36
2.4 ReviewTerhadap Rancangan Awal RKPD II-38

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-41

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional III-41
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah III-42
3.3 Program Dan Kegiatan III-43

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-46

BAB V PENUTUP V-50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021

Tabel 2.2 Tabel Performance Pelayanan Rawat Inap

Tabel 2.3 Persentase Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Tahun 2021

Tabel 2.4 Laporan Pendapatan BLUD Bulan Desember 2021

Tabel 2.5 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.7 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Tabel 3.1 Target Kinerja Indikator Program Tahun 2023

Tabel 3.2 Target Kinerja Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Jumlah Kunjungan Pasien IGD Periode Januari s.d Desember 2021

Grafik 2.3 Jumlah Kunjungan Pasien IGD Berdasarkan Tindak Lanjut Pelayanan Periode Januari s.d Desember 2021

Grafik 2.4 Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Periode Januari s.d Desember 2021

Grafik 2.5 Jumlah Kunjungan Pasien Poliklinik Rawat Jalan Periode Januari s.d Desember 2021

Grafik 2.6 Grafik Barber Johnson Periode 2017 s.d 2021

Grafik 2.7 Grafik Indikator GDR & NDR Periode 2017 s.d 2021

Grafik 2.8 Jumlah Pasien COVID-19 dan Non COVID-19 Dirawat

Grafik 2.9 Jumlah Kunjungan Pasien Radiologi Periode Januari s.d Desember 2021

Grafik 2.10 Perbandingan Jumlah Pemeriksaan Radiologi Periode 2020 & 2021

Grafik 2.11 Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Periode Januari s.d Desember 2021

Grafik 2.12 Jumlah Kegiatan Farmasi Periode Januari s.d Desember 2021

Grafik 2.13 Perbandingan Jumlah Kegiatan Farmasi Periode 2020 & 2021

Grafik 2.14 Jumlah Kunjungan Pasien Rehabilitasi Medis Periode Januari s.d Desember 2021

Grafik 2.15 Perbandingan jumlah Kunjungan Pasien Rehabilitasi Medis Periode 2020 & 2021

Grafik 2.16 Jumlah Pemakaian Darah di Bank Darah Rumah Sakit Periode Januari s.d Desember 2021

Grafik 2.17 Perbandingan Jumlah Pemakaian Darah di Bank Darah Rumah Sakit Periode 2020 & 2021

Grafik 2.18 Jumlah Tindakan Operasi di Instalasi Bedah Sentral (IBS) Periode Januari s.d Desember 2021

Grafik 2.19 Perbandingan Jumlah Tindakan Operasi di IBS Periode 2020 & 2021

Grafik 2.20 Jumlah Tindakan Operasi Berdasarkan Spesialisasi Periode Januari s.d Desember 2021

Grafik 2.21 Jumlah Tindakan Hemodialisa Periode Januari s.d Desember 2021

Grafik 2.22 Perbandingan Jumlah Tindakan Hemodialisa Periode 2020 & 2021

Grafik 2.23 Jumlah Tindakan Audiometri Periode Januari s.d Desember 2021

Grafik 2.24 Perbandingan Jumlah Tindakan Audiometri Periode 2020 & 2021

Grafik 2.25 Jumlah Tindakan Kemoterapi Periode Januari s.d Desember 2021
Grafik 2.26 Perbandingan Jumlah Tindakan Audiometri Periode 2020 & 2021
Grafik 2.27 Jumlah Tindakan Cathlab Periode Januari s.d Desember 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta saat ini mempunyai klasifikasi Rumah Sakit Tipe B Pendidikan. Klasifikasi Rumah Sakit Tipe B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1214/Menkes/SK/IX/2007 tanggal 28 November 2007, sedangkan predikat sebagai Rumah Sakit Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0233/2014 tertanggal 21 Februari 2014. Tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Yogyakarta ditetapkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan. Sesuai Perwal tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta merupakan unit Organisasi Bersifat Khusus (OBK) yang memiliki otonomi pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian yang dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta telah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Pengelolaan keuangan Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah upaya untuk mengatasi permasalahan dan memudahkan rumah sakit daerah menjadi suatu lembaga yang mampu mengupayakan peningkatan kinerja pelayanan, kinerja keuangan serta optimal dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sedangkan pengertian Rumah Sakit sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, adalah institusi atau organisasi perangkat daerah, pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan penunjang kesehatan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit tersebut juga memuat kewajiban Rumah Sakit dalam upaya peningkatan mutu pelayanan untuk melaksanakan penilaian akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. Penilaian akreditasi RSUD Kota Yogyakarta telah dilakukan pada tahun 2019 dengan meraih predikat akreditasi paripurna pada 7 Mei 2019 dengan masa berlaku selama 3 tahun sampai dengan 8 Mei 2022.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Proses penyusunan Renja dimulai dari persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintasPerangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; sampai pada penetapan.

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan dokumen penyempurnaan perencanaan tahunan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta. Program dan Kegiatan RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini disesuaikan dengan :

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
- Prioritas Nasional sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara Tahun 2005-2025 dan produk hukum turunannya seperti: Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024, Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, dan Andilnya dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) bidang kesehatan.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.
- Rencana Strategis Bisnis RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023–2026.
- Penetapan RSUD Kota Yogyakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/I/1122/2017 tanggal 20 April 2017.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sebagai unit Organisasi Bersifat Khusus (OBK) dibawah Dinas Kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 maka dalam hal penyusunan Rencana Kerja harus selaras dan menjadi bagian dari Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang berlaku dengan melakukan pemetaan (mapping) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk kemudian dilakukan perubahan dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan RPJMN 2020-2024. Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Yogyakarta tahun 2023 mengusung tema "Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya Untuk Keberdayaan Masyarakat". Sedangkan visi RPD Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026 adalah "Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan". Berdasar pada visi tersebut telah ditetapkan 9 misi, 11 sasaran beserta targetnya, Rumah Sakit Umum Daerah kota Yogyakarta masuk ke dalam misi 9 sasaran 11 yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat meningkat dengan target tahun 2023 sebesar 74,77%.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023 ini dilakukan melalui perencanaan yang bersifat bottom-up berdasarkan masukan dari setiap bidang dan bagian di lingkungan rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan. Kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan kebutuhan rumah sakit. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara langsung oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sekaligus sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Belanja dan Anggaran (RBA) RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2022.

Visi RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah:

"Terwujudnya Rumah Sakit Pilihan Masyarakat dan Wahana Pendidikan Berkompeten"

sedangkan misi yang ditetapkan sebagai penjabaran Visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan pelayanan rumah sakit secara paripurna berbasis keselamatan pasien (Method)
2. Menerapkan sistem manajemen berbasis teknologi informasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Money, Material, Machine)
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar (Man, Machine)
4. Mewujudkan rumah sakit sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengembangan (Method)

Dalam menetapkan visi dan misi RSUD Kota Yogyakarta disesuaikan dengan Tujuan Strategis "Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan" dengan Sasaran Strategis "Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan" yang tercantum Dalam Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020–2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

a. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
d. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
j. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
k. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1214/Menkes/SK/XI/2007 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Jogja Milik Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta;
l. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/391/2014 Tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional;
m. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.07/MENKES/243/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Untuk Rumah Sakit Umum

Daerah Panembahan Senopati dan Fakultas Kesehatan Dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

o. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

p. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan;

q. Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 050/464 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan bagi seluruh personil organisasi dan pihak-pihak yang terkait dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dan tujuan yang hendak dicapai di tahun 2023.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini antara lain:

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan manajemen Rumah Sakit yang transparan, efektif dan efisien, responsif serta berkeadilan, dengan tersedianya rencana kerja sebagai pedoman arah dan tujuan yang pasti.

b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan rumah sakit.

c. Mengembangkan pola pikir sumber daya manusia dan manajemen rumah sakit kepada sikap dan tindakan yang berorientasi pada koridor perencanaan yang telah ditetapkan.

d. Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada guna terwujudnya visi, tercapainya misi dan tujuan pembangunan.
e. Tersusunnya Program, Rencana Kegiatan, dengan indikator-indikator program dan kegiatan yang akan dicapai, sumber-sumber pembiayaan/dana yang diperlukan, Tatakala Kegiatan dengan jelas, terinci dan terstruktur, sehingga dapat diwujudkannya visi, dan tercapainya misi yang diinginkan pada waktu yang telah direncanakan.
f. Melakukan identifikasi dan antisipasi terhadap kelemahan, tantangan serta hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja sehingga dapat menyusun strategi pemecahan masalah dengan tepat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021 berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2021 dan capaian Renstra RSUD Kota Yogyakarta disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021

RSUD KOTA YOGYAKARTA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	02	02	020		**PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN RUMAH SAKIT JOGJA**	1. Persentase karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun			13,60%	**118.885.705.143,74**										
						2. Persentase sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan			82,23%											
						3. Jumlah modul Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)			22											
1	02	02	020	001	Kegiatan Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rujukan				72.236.867.542										
1	02	02	020	002	Kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	Pelayanan Kesehatan RS Rujukan yang sesuai standar				46.648.837.601,74										

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	02				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**151.293.584.520**				**135.435.296.854**		**122.979.054.159,56**				**135.435.296.854**		
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Sesuai Standar Rumah Sakit Rujukan Regional Kelas B Pendidikan	84,1%	**38.547.000.000**	-	-	81%	**19.525.891.538**	81,50%	**16.902.482.854**	101%		81%	**19.525.891.538**		
						Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)	-		-		24 modul		24 modul		100%		24 modul			
						Persentase Karyawan Mendapatkan Pelatihan Minimal 20 Jam per Tahun	-		-		12%		23,70%		198%		12%			
						Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal	80,25%				-		-		-		-			
						Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	80%				-		-		-		-			
						Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan	80%				-		-		-		-			
1	02	02	2	01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota			38.200.000.000				19.165.891.538		16.655.826.854				19.165.891.538		
1	02	02	2	02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota			50.000.000												
1	02	02	2	03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			297.000.000				360.000.000		246.656.000				360.000.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentase Tata Kelola Rumah Sakit yang mendukung skor akreditasi	80%	**112.746.584.520**				**115.909.405.316**		**106.076.571.305,56**				**115.909.405.316**		
						Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)										A (Nilai >80 s.d 90)			
						Persentase pelayanan sarana dan prasarana, kepegawaian dan hukmas terpenuhi	100%				-		-		-		-			
1	02	01	2	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.000.000												
1	02	01	2	02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah			6.000.000				1.730.772.518		1.730.772.518				1.730.772.518		
1	02	01	2	05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-												
1	02	01	2	06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			450.000.000				388.240.288		356.416.800				388.240.288		
1	02	01	2	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.208.000.000				12.628.437.701		11.546.465.094,16				12.628.437.701		
1	02	01	2	09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.093.000.000				1.586.555.000		1.545.870.147,40				1.586.555.000		
1	02	01	2	10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD			95.983.584.520				99.575.399.809		90.897.046.746				99.575.399.809		

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, dari ketiga indikator program, semua indikator program dapat mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2020 telah dilakukan reviu Renstra perubahan target indikator program, yaitu pada indikator Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun. Target tahun 2020 yang semula 45% diturunkan menjadi 8% dan untuk tahun 2021 menjadi 12% dikarenakan kondisi yang disebabkan pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan diadakannya pelatihan secara tatap muka. Sejalan dengan dilakukannya reviu Renstra tahun 2020, RSUD Kota Yogyakarta tetap mencari alternatif pencapaian target pelatihan/peningkatan SDM dengan metode yang lebih tepat melalui metode daring, walaupun ada kemungkinan beberapa pelatihan/peningkatan mutu SDM tidak dapat dilaksanakan dengan metode daring. Capaian target indikator program persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun pada 2021 ini lebih tinggi dari target karena seiring dengan adanya adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi sehingga sudah banyak tersedia pelatihan karyawan dengan metode daring.

Pada tahun 2021 juga dilakukan reviu Renstra dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 untuk menambahkan indikator program baru yang akan ditargetkan pada tahun 2022 yaitu indikator Presentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal dengan target sebesar 80%.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Jumlah kunjungan pasien dalam tahun 2021 secara umum mengalami kenaikan daripada kunjungan tahun 2020 yang menurun secara signifikan dengan ditetapkannya status masa tanggap darurat bencana non alam COVID-19 oleh pemerintah pada bulan Maret 2020 yang memaksa Rumah Sakit untuk membatasi jumlah kunjungan pasien dengan tujuan untuk meminimalisir potensi penularan COVID-19. Pada tahun 2021 jumlah kunjungan mengalami peningkatan seiring dengan adaptasi dengan kebiasaan baru di masa pandemi sehingga Rumah Sakit tidak lagi membatasi jumlah kunjungan pasien tetapi menerapkan protokol kesehatan secara ketat baik untuk pasien maupun tenaga kesehatan. Kinerja pelayanan RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021 terdiri dari pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap dan pelayanan penunjang sebagai berikut :

1. Rawat Darurat

Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Pelayanan di IGD dilakukan oleh SDM yang terlatih sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan dalam penanganan kondisi darurat pasien, antara lain: Dokter bersertifikat ATLS, ACLS dan GELS; Perawat

Terlatih PPGD; Instruktur PPGD; Ambulance 118. Berikut jumlah kunjungan pasien IGD tahun 2021 dalam grafik berikut:

Grafik 2.1
Jumlah Kunjungan Pasien IGD
Periode: Januari s.d. Desember 2021

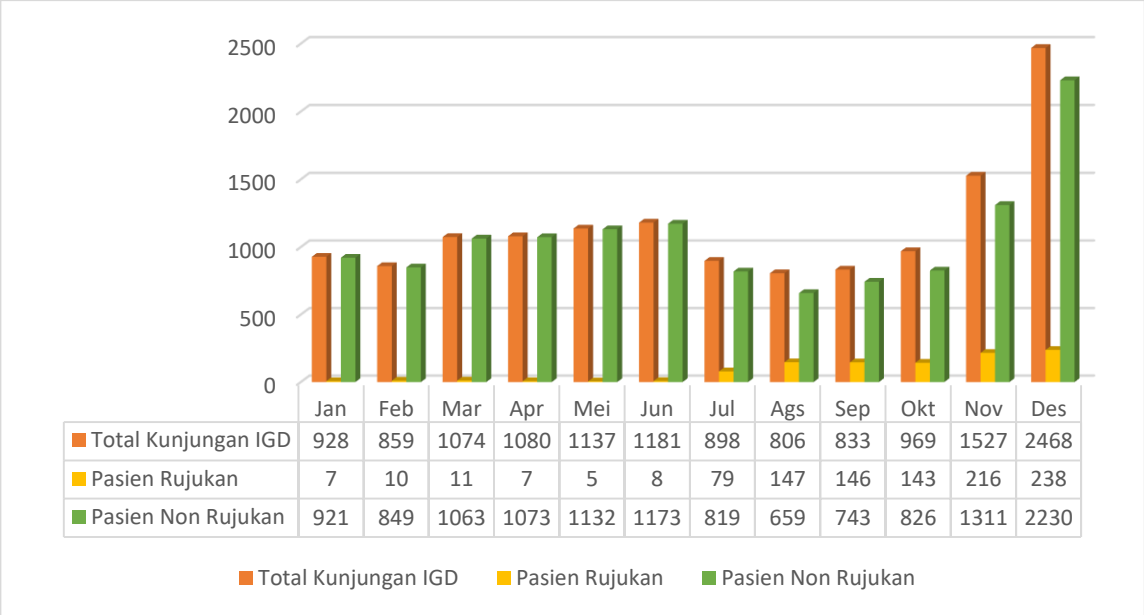

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Total Kunjungan IGD	928	859	1074	1080	1137	1181	898	806	833	969	1527	2468
Pasien Rujukan	7	10	11	7	5	8	79	147	146	143	216	238
Pasien Non Rujukan	921	849	1063	1073	1132	1173	819	659	743	826	1311	2230

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021, diolah

Berdasarkan grafik diatas, kunjungan pasien non rujukan selalu mendominasi setiap bulannya. Kunjungan pasien tertinggi pada bulan desember sebesar 2.468, sedangkan kunjungan terendah di bulan Agustus sebesar 806.

Grafik 2.2
Jumlah Kunjungan Pasien IGD Berdasarkan Status Rujukan
Periode: Januari s.d. Desember 2021

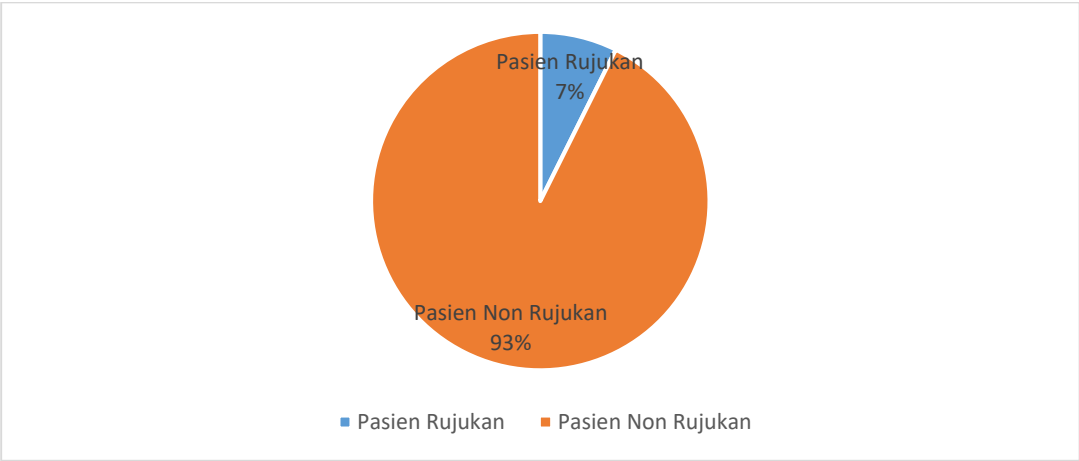

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Persentase jumlah kunjungan pasien Instalasi Gawat Darurat berdasarkan status rujukan meliputi Pasien Non Rujukan sebesar 93% (12.799) dan Pasien Rujukan sebesar 7% (1.017).

Grafik 2.3
Jumlah Kunjungan Pasien IGD Berdasarkan Tindak Lanjut Pelayanan
Periode: Januari s.d. Desember 2021

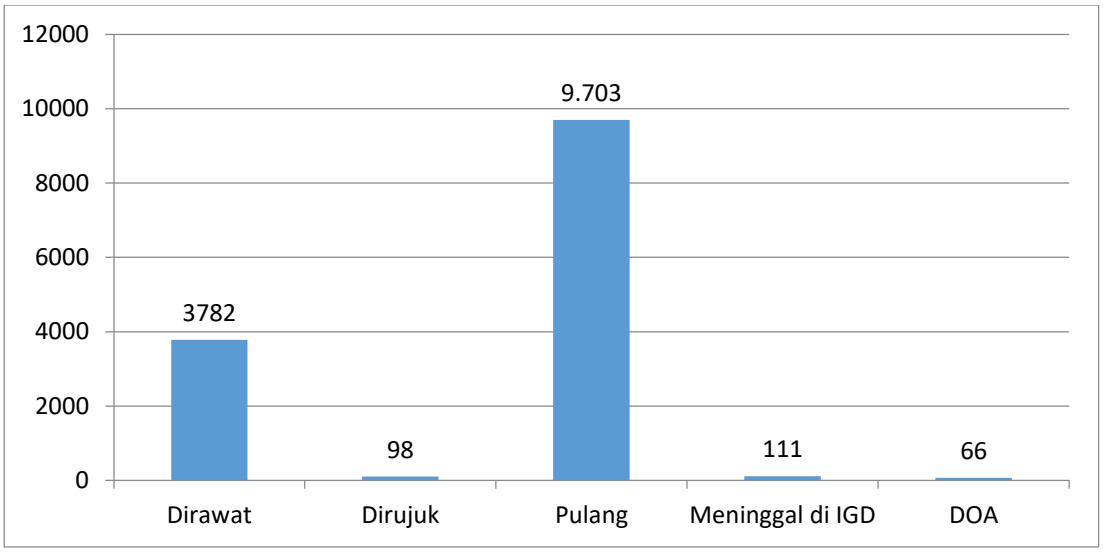

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Pada periode Januari s.d. Desember 2021, dari jumlah kunjungan pasien yang dilayani di IGD tindak lanjut pelayanannya meliputi pasien pulang sebesar 9.703, dirawat sebesar 3.782, Meninggal di IGD sebesar 111, pasien dirujuk 98 dan Death on Arrival (D.O.A) sebesar 66.

2. Rawat Jalan

Pelayanan pasien rawat jalan dilayani di 25 poliklinik rawat jalan yang ada di RSUD Kota Yogyakarta, grafik pelayanan rawat jalan sebagai berikut:

Grafik 2.4
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status
Periode: Januari s.d Desember 2021

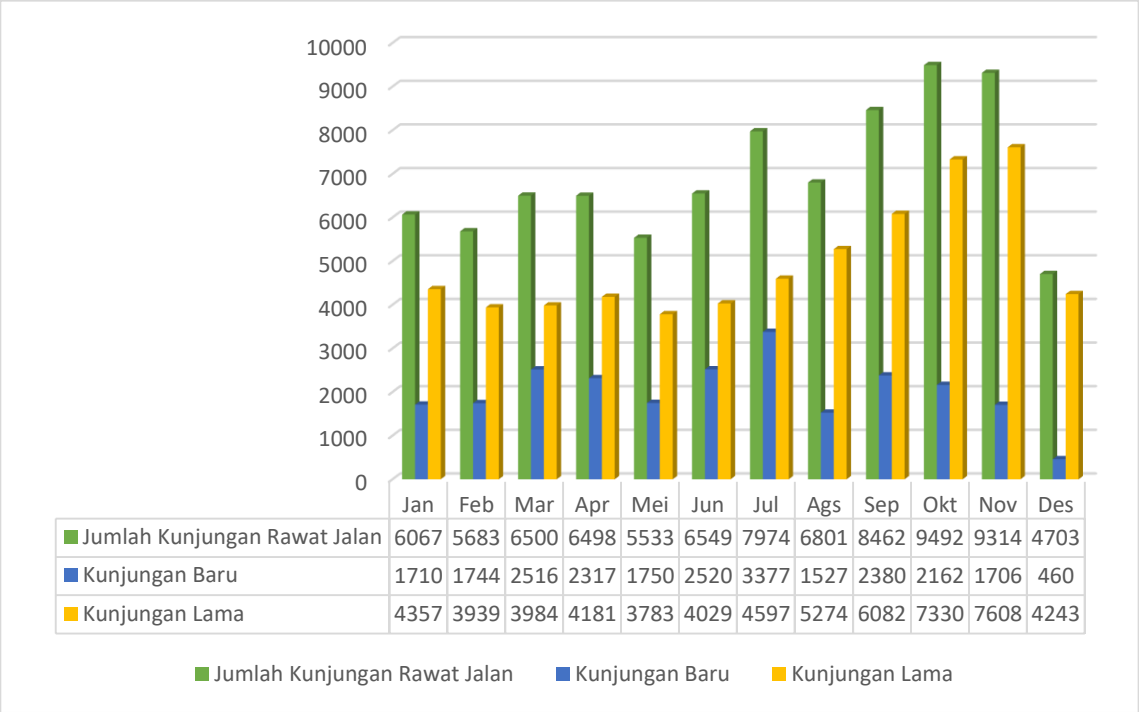

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Grafik 2.5
Jumlah Kunjungan Pasien Poliklinik Rawat Jalan
Periode: Januari s.d. Desember 2021

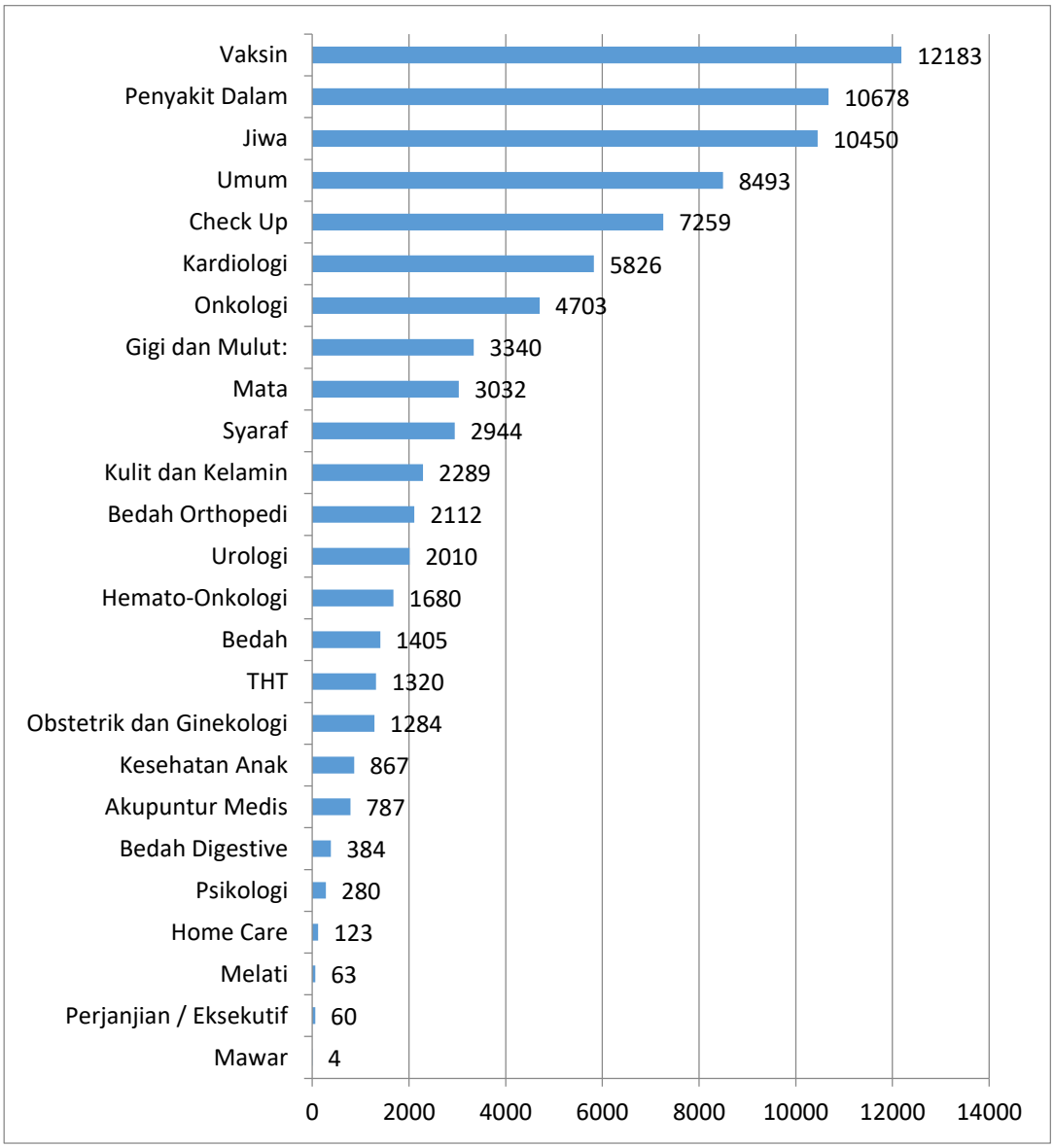

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Pada periode Januari sampai dengan Desember 2021, jumlah kunjungan pasien poliklinik rawat jalan tertinggi yaitu Klinik Vaksin sebesar 12.183 pasien. Klinik Vaksin merupakan klinik khusus yang dibuka untuk melayani vaksinasi COVID-19. Jumlah kunjungan pasien poliklinik rawat jalan tertinggi selanjutnya adalah Klinik Penyakit Dalam (10.678) dan Klinik Jiwa (10.450). Sedangkan kunjungan terendah ada pada klinik mawar yang melayani pasien Tuberkulosis sebesar 4 pasien.

3. Rawat Inap

Sebagai Rumah Sakit rujukan COVID-19, pelayanan pasien rawat inap pada tahun 2021 dipisahkan berdasarkan area infeksius untuk merawat pasien COVID-19 dan area perawatan biasa untuk pasien non COVID-19. Berikut grafik layanan rawat inap tahun 2021:

Grafik 2.6
Grafik Barber Johnson
Periode: 2017 s.d. 2021

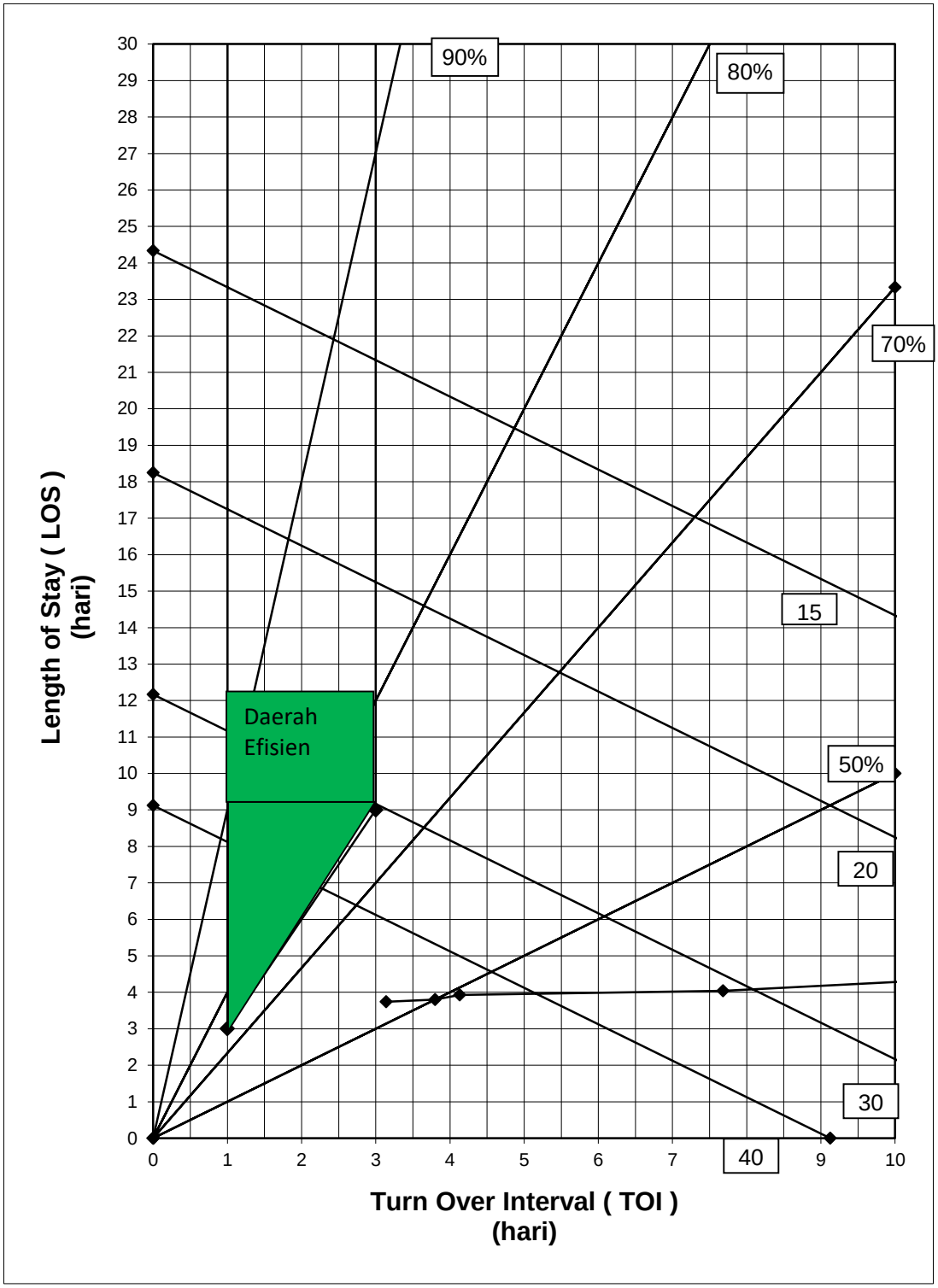

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Tabel 2.2
Tabel Performance Pelayanan Rawat Inap
Periode: 2017 s.d. 2021

Bulan	BOR (Dalam %)	LOS (Dalam Hari)	TOI (Dalam Hari)	BTO (Dalam Kali)
Tahun 2021	29.45	4.32	10.34	24.90
Tahun 2020	35.69	4.04	7.68	30.67
Tahun 2019	50.47	3.93	4.13	43.75
Tahun 2018	51.66	3.80	3.80	46.49
Tahun 2017	56.48	3.74	3.14	50.66
Nilai Ideal	**60-85%**	**6-9**	**1-3**	**> 30**

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Grafik barber Johnson merupakan salah satu tolok ukur dalam melihat efisiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit. Titik performance pelayanan rawat inap di RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021 belum berada pada daerah efisien. Titik performance Grafik Barber Johnson pada Tahun 2021 semakin menjauhi wilayah efisien daripada tahun sebelumnya.

Grafik 2.7
Grafik Indikator GDR & NDR
Periode: 2017 s.d. 2021

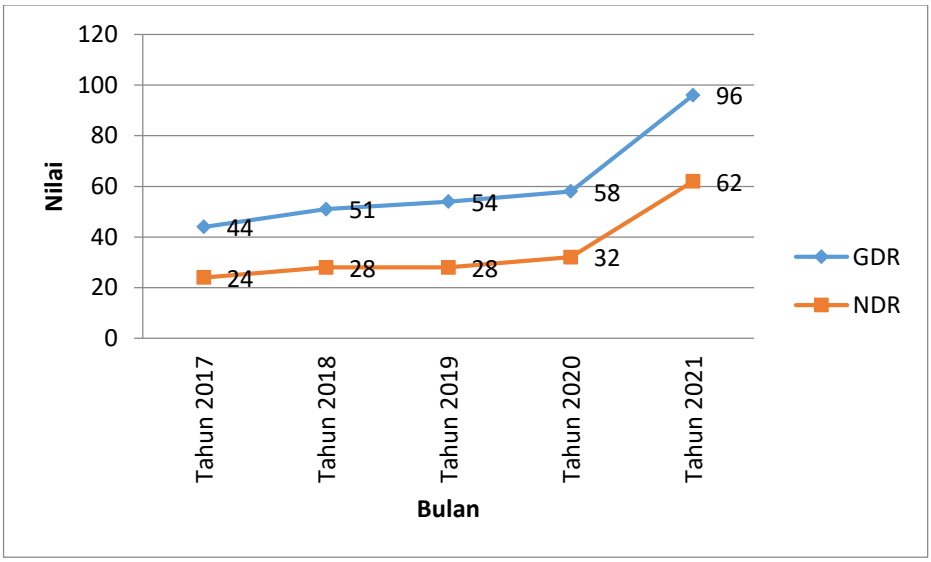

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Standar nilai ideal GDR oleh Kemenkes RI adalah kurang dari 45 permil. Nilai GDR di RSUD Kota Yogyakarta pada tahun 2021 berada dalam kategori tidak ideal atau lebih dari 45 permil. Sedangkan standar untuk nilai NDR adalah kurang dari 25 permil. Nilai NDR RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021 juga berada dalam kategori tidak ideal atau lebih dari 25 permil.

Grafik 2.8
Jumlah Pasien COVID-19 dan Non COVID-19 Dirawat
Periode: Januari s.d. Desember 2021

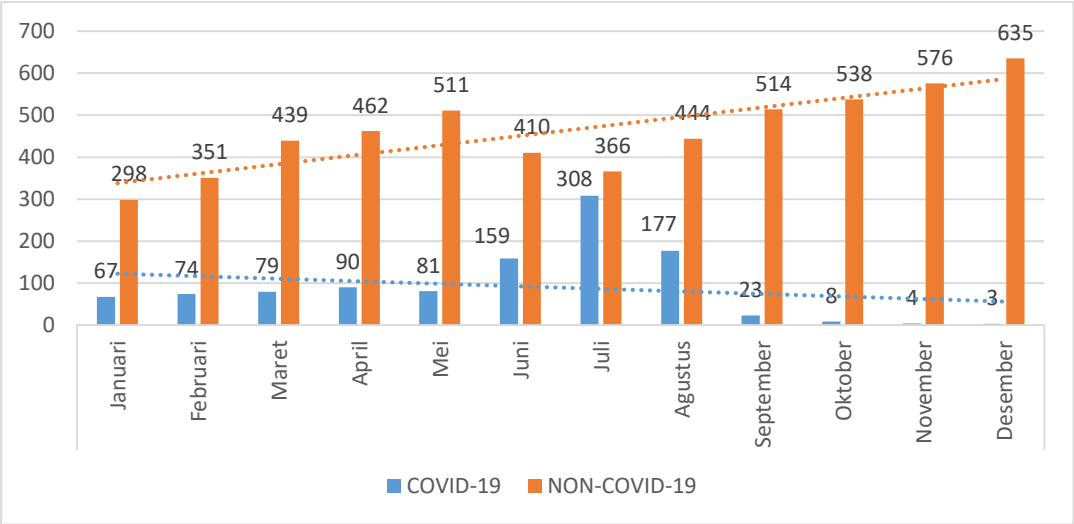

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Jumlah pasien dirawat kasus COVID-19 pada periode Januari s.d. Desember 2021 cenderung mengalami penurunan. Jumlah pasien dirawat kasus COVID-19 tertinggi terjadi pada bulan Juli 2021 sebesar 308 pasien.

4. Pelayanan Penunjang

Pelayanan penunjang diselenggarakan untuk menyediakan pelayanan pendukung penegakan diagnosis, terapi dan penunjang kesehatan lainnya. Grafik pelayanan penunjang RSUD Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pelayanan Radiologi

Grafik 2.9
Jumlah Kunjungan Pasien Radiologi
Periode: Januari s.d. Desember 2021

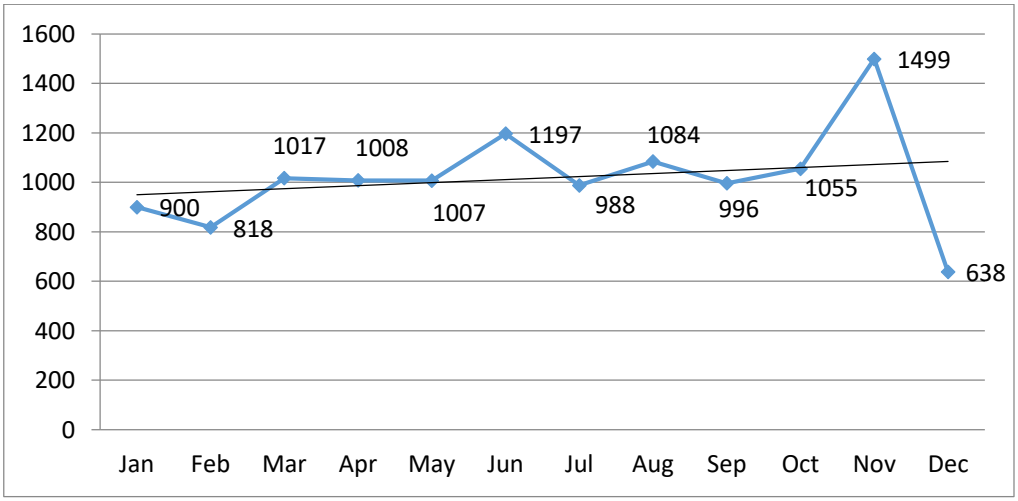

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Jumlah kunjungan pasien Radiologi pada periode Januari sampai dengan Desember 2021 cenderung mengalami peningkatan. Jumlah kunjungan pasien Radiologi tertinggi terjadi pada bulan November 2021 sebesar 1499 pasien.

Grafik 2.10
Perbandingan Jumlah Pemeriksaan Radiologi
Periode: 2020 & 2021

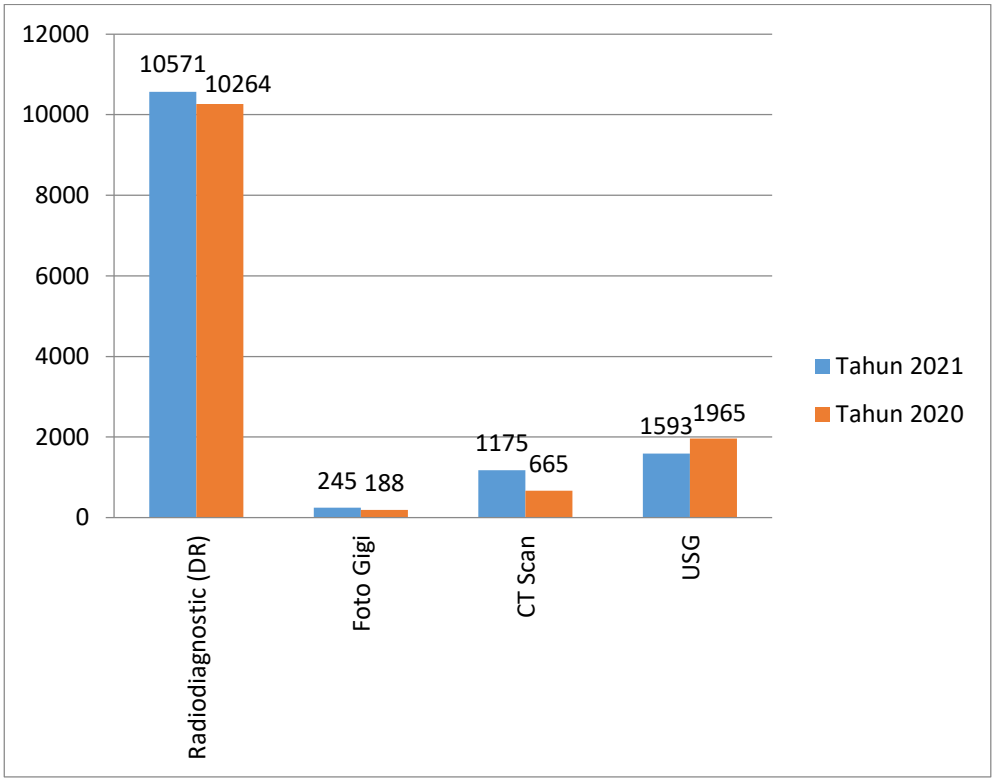

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Jumlah Pemeriksaan Radiodiagnostic (DR) menjadi pemeriksaan terbanyak di Instalasi Radiologi. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada periode tahun 2021 pemeriksaan Radiodiagnostic (DR) mengalami peningkatan sebesar 3%, pemeriksaan Foto Gigi mengalami peningkatan sebesar 30%, pemeriksaan CT Scan mengalami peningkatan sebesar 70% dan pemeriksaan USG mengalami penurunan sebesar 19%.

2. Pelayanan Laboratorium

Grafik 2.11
Jumlah Pemeriksaan Laboratorium
Periode: Januari s.d. Desember 2021

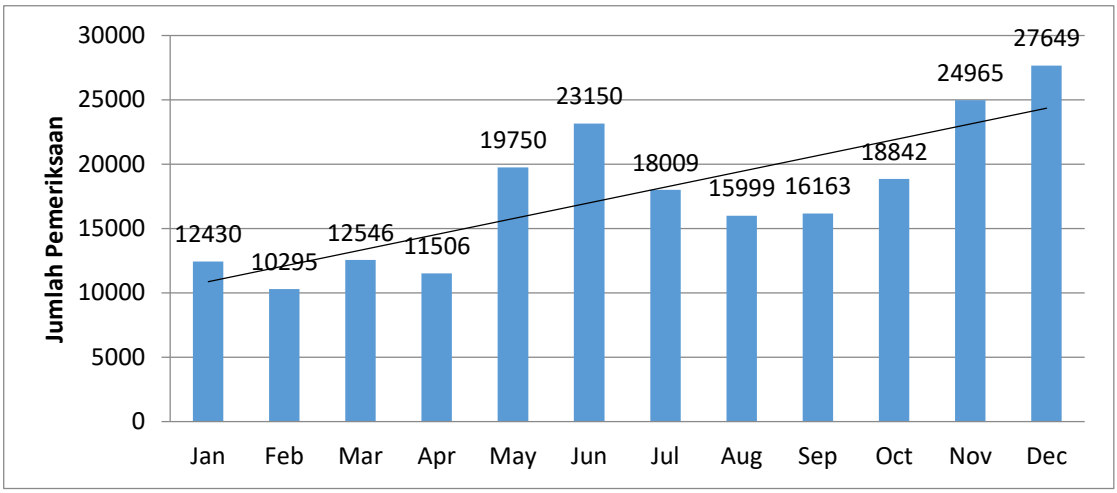

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Pada periode Januari sampai dengan Desember 2021, Jumlah Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kota Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan. Pemeriksaan Laboratorium tertinggi terjadi di bulan Desember 2021 yaitu 27.649 pemeriksaan.

3. Pelayanan Farmasi

Grafik 2.12
Jumlah Kegiatan Farmasi
Periode: Januari s.d. Desember 2021

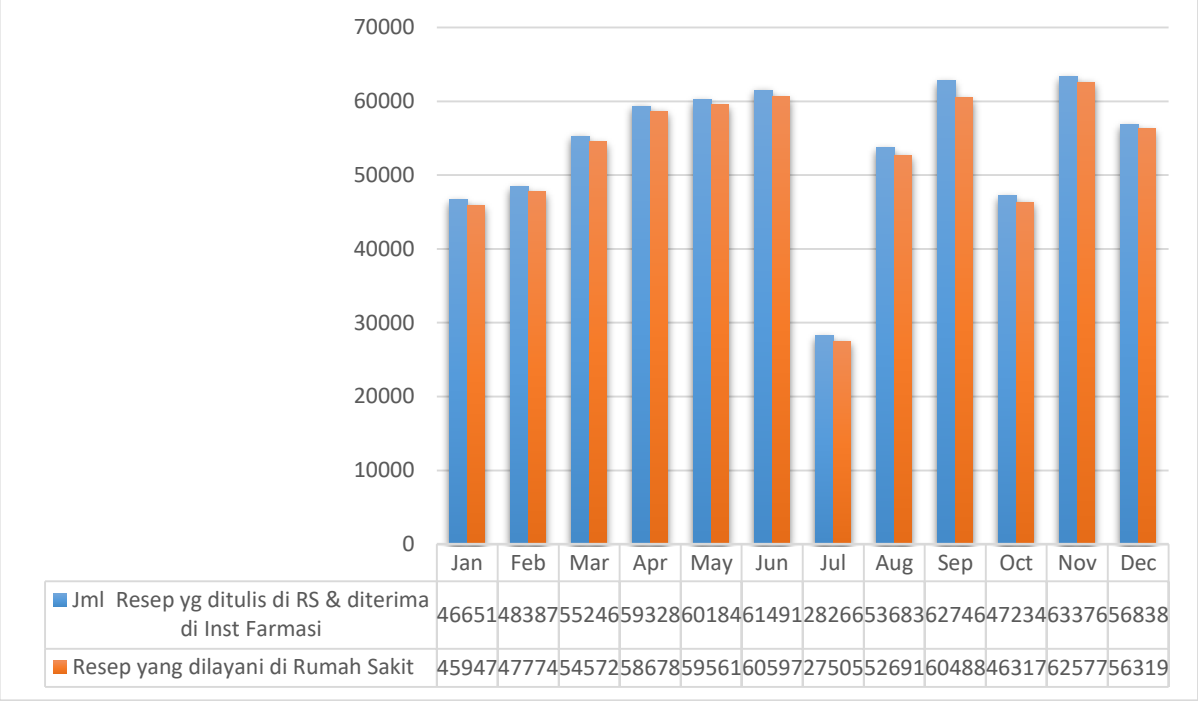

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Pada periode Januari sampai dengan Desember 2021, kegiatan farmasi RSUD Kota Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan. Kegiatan Farmasi tertinggi terjadi di bulan November 2021 yaitu Jumlah resep yang ditulis di RS & diterima di Inst. Farmasi sebesar 633 dan Jumlah Resep yang dilayani di RS sebesar 625. Kegiatan Farmasi terendah terjadi di bulan Juli 2021 yaitu Jumlah resep yang ditulis di RS & diterima di Inst. Farmasi sebesar 282 dan Jumlah Resep yang dilayani di RS sebesar 275.

Grafik 2.13
Perbandingan Jumlah Kegiatan Farmasi
Periode: 2020 & 2021

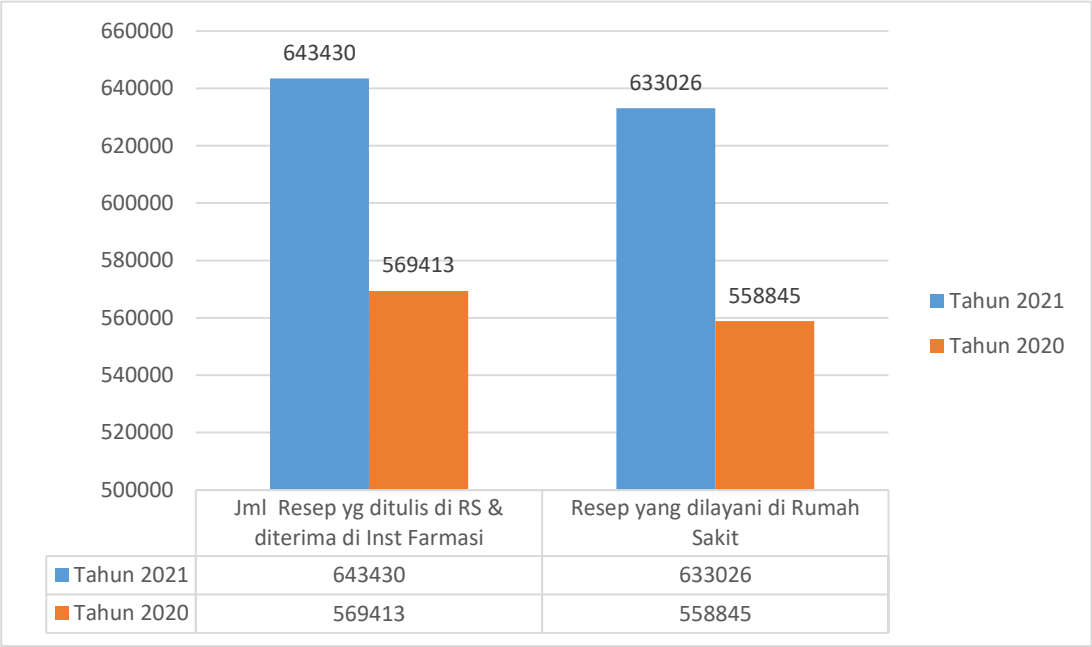

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Apabila dibandingan dengan tahun sebelumnya, Jumlah resep yang ditulis di RS & diterima di Inst. Farmasi dan Jumlah Resep yang dilayani di RS pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 13%.

4. Pelayanan Rehabilitasi Medis

Grafik 2.14
Jumlah Kunjungan Pasien Rehabilitasi Medis
Periode: Januari s.d. Desember 2021

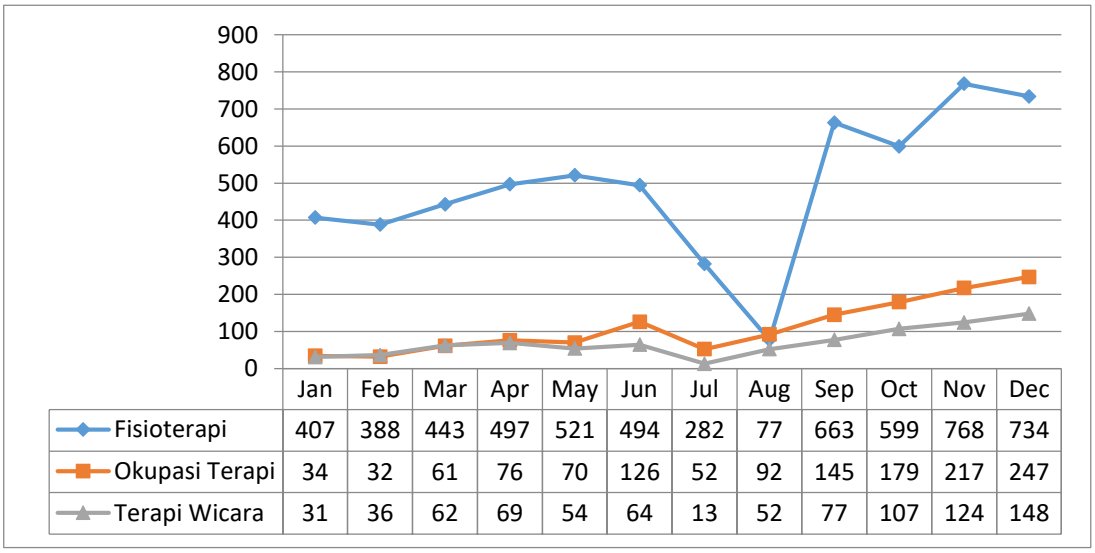

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Pada periode Januari sampai dengan Desember 2021, kegiatan Rehabilitasi Medis RSUD Kota Yogyakarta yang meliputi FIsioterapi, Okupasi Terapi dan Terapi Wicara cenderung mengalami peningkatan.

Grafik 2.15
Perbandingan Jumlah Kunjungan Pasien Rehabilitasi Medis
Periode: 2020 & 2021

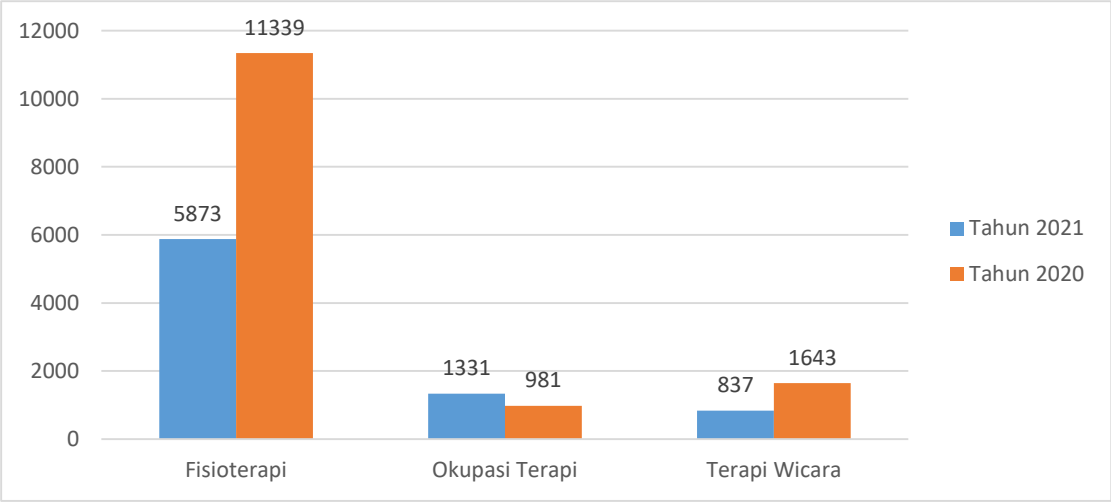

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Apabila dibandingan dengan tahun sebelumnya, Jumlah Kunjungan Pasien Fisioterapi mengalami penurunan sebesar 48%, Jmlah Kunjungan Pasien Okupasi Terapi mengalami peningkatan sebesar 36% dan Jumlah Kunjungan Pasien Terapi WIcara mengalami penurunan sebesar 49%.

5. Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)

Grafik 2.16
Jumlah Pemakaian Darah di Bank Darah Rumah Sakit
Periode: Januari s.d. Desember 2021

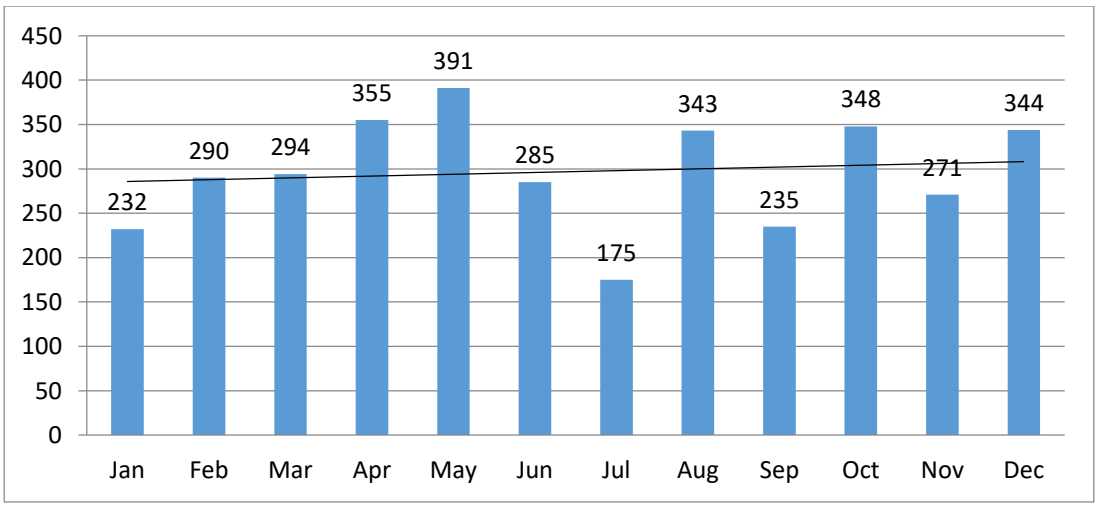

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Jumlah pemakaian darah di Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) RSUD Kota Yogyakarta pada periode Januari sampai dengan Desember 2021 cenderung mengalami peningkatan. Jumlah pemakaian darah tertinggi terjadi di bulan Mei 2021 (391) dan terendah terjadi di bulan Juli 2021 (175).

Grafik 2.17
Perbandingan Jumlah Pemakaian Darah di Bank Darah Rumah Sakit
Periode: 2020 & 2021

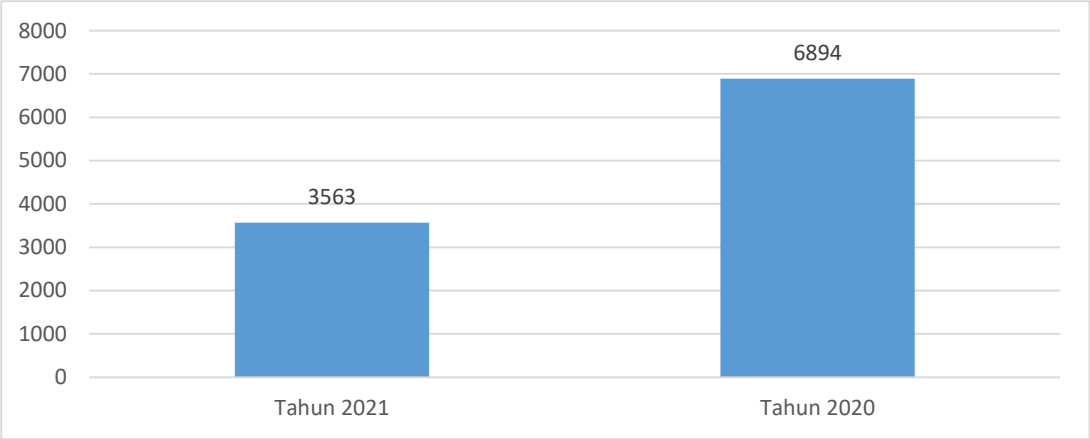

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Apabila dibandingan dengan tahun sebelumnya, Jumlah pemakaian darah di Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) pada periode tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 48%.

6. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS)

Grafik 2.18
Jumlah Tindakan Operasi di Instalasi Bedah Sentral (IBS)
Periode: Januari s.d. Desember 2021

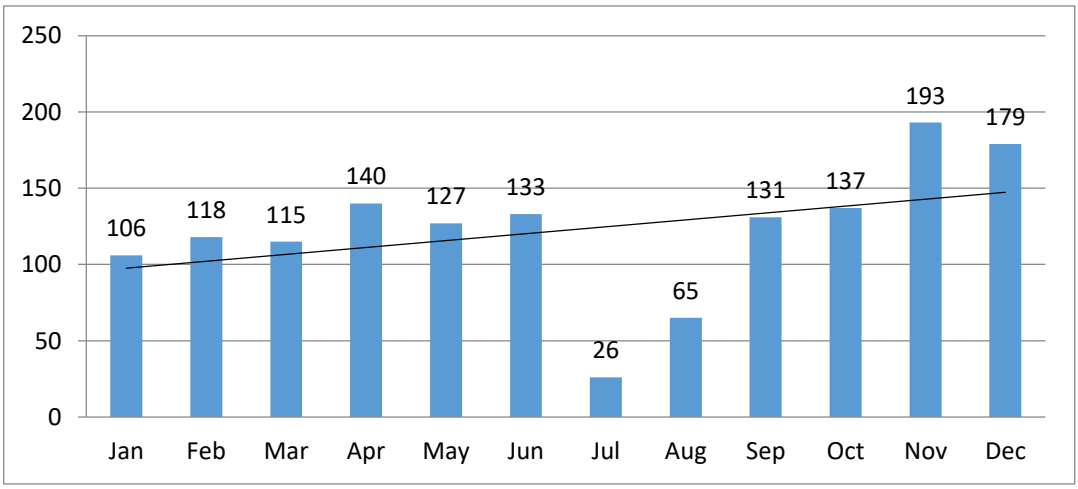

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Jumlah tindakan operasi di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Kota Yogyakarta pada periode Januari sampai dengan Desember 2021 cenderung mengalami peningkatan. Jumlah tindakan operasi tertinggi terjadi di bulan November 2021 (193) dan terendah terjadi di bulan Juli 2021 (26).

Grafik 2.19
Perbandingan Jumlah Tindakan Operasi di IBS
Periode: 2020 & 2021

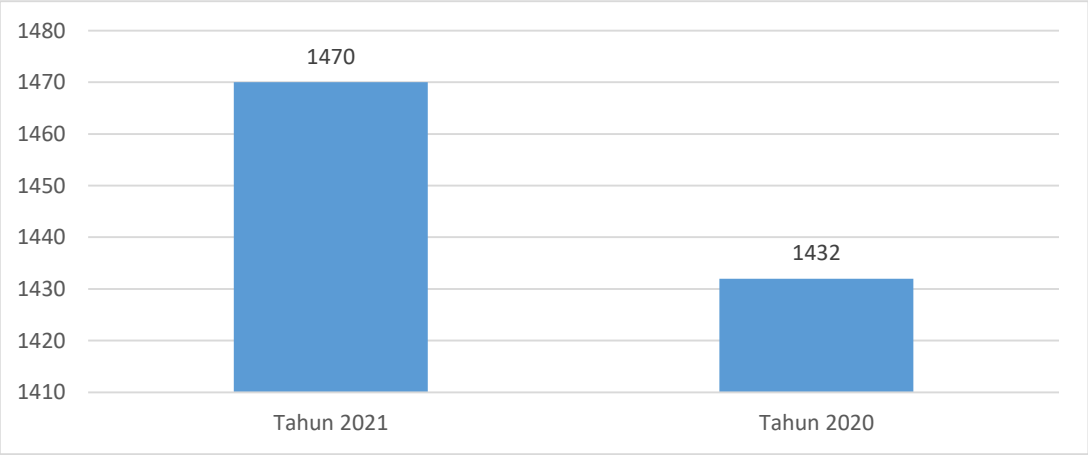

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Apabila dibandingan dengan tahun sebelumnya, Jumlah tindakan operasi di IBS pada periode tahun 2021 mengalami peningkatan dengan prosentase sebesar 3%.

Grafik 2.20
Jumlah Tindakan Operasi Berdasarkan Spesialisasi
Periode: Januari s.d. Desember 2021

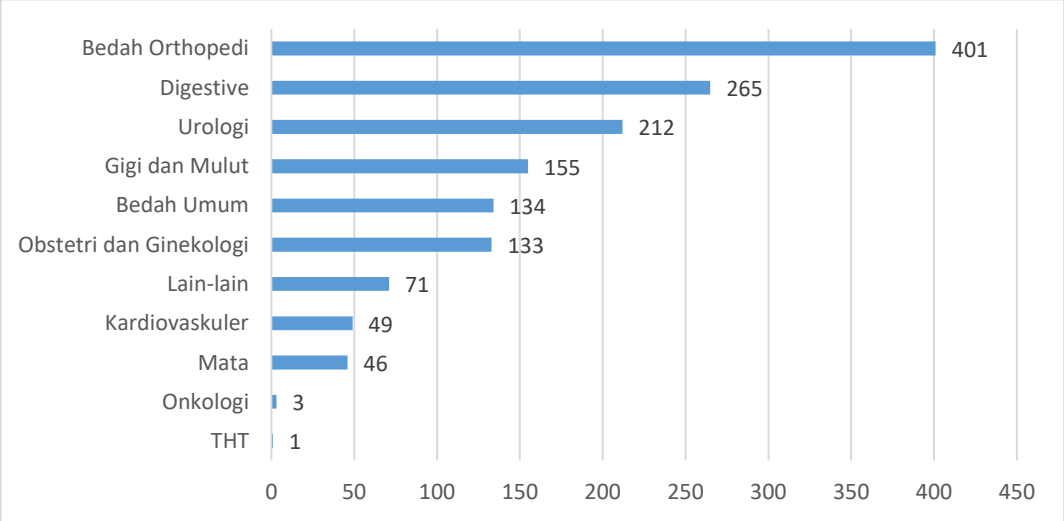

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Apabila dilihat dari jenis spesialisasinya, tindakan operasi Bedah Orthopedi menjadi tindakan operasi terbanyak di tahun 2021 diikuti tindakan operasi Digestive dan Tindakan Operasi Urologi di peringkat 2 dan 3.

7. Pelayanan Hemodialisa

Grafik 2.21
Jumlah Tindakan Hemodialisa
Periode: Januari s.d. Desember 2021

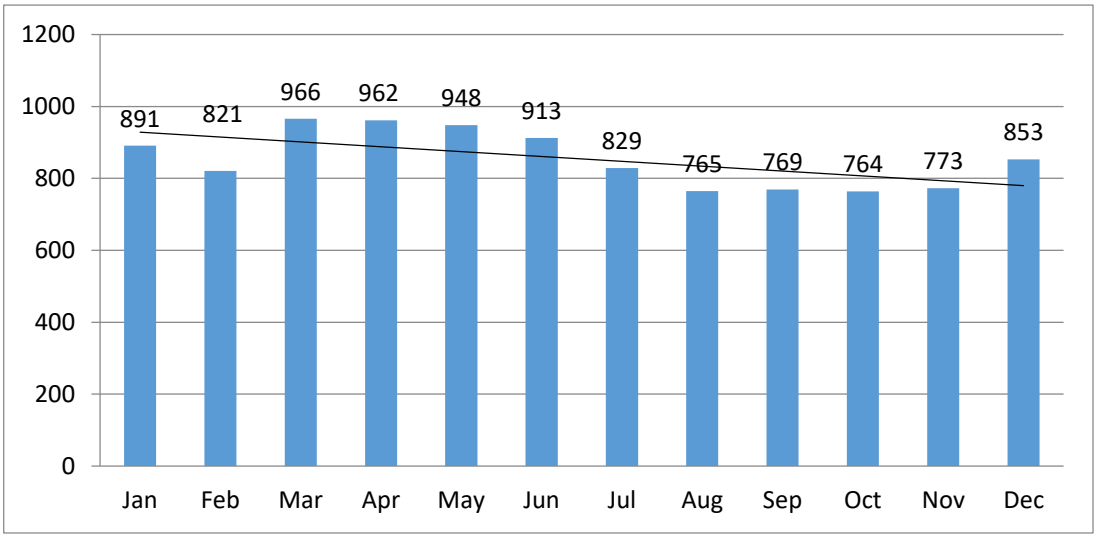

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Jumlah tindakan Hemodialisa RSUD Kota Yogyakarta pada periode Januari sampai dengan Desember 2021 cenderung mengalami penurunan. Jumlah tindakan operasi tertinggi terjadi di bulan Maret 2021 (966) dan terendah terjadi di bulan Oktober 2021 (764).

Grafik 2.22
Perbandingan Jumlah Tindakan Hemodialisa
Periode: 2020 & 2021

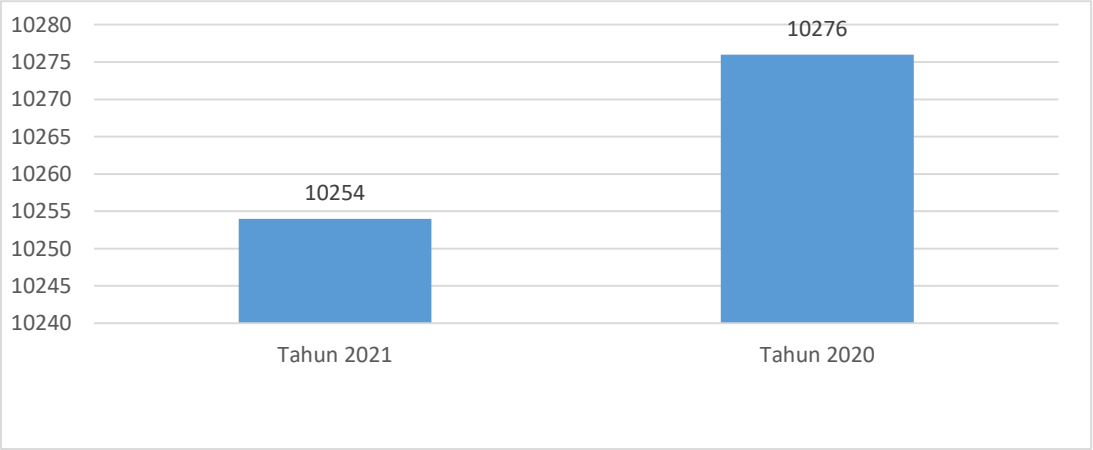

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Apabila dibandingan dengan tahun sebelumnya, Jumlah tindakan Hemodialisa pada periode tahun 2021 mengalami penurunan dengan prosentase sebesar 0.2%.

8. Pelayanan Audiometri

Grafik 2.23
Jumlah Tindakan Audiometri
Periode: Januari s.d. Desember 2021

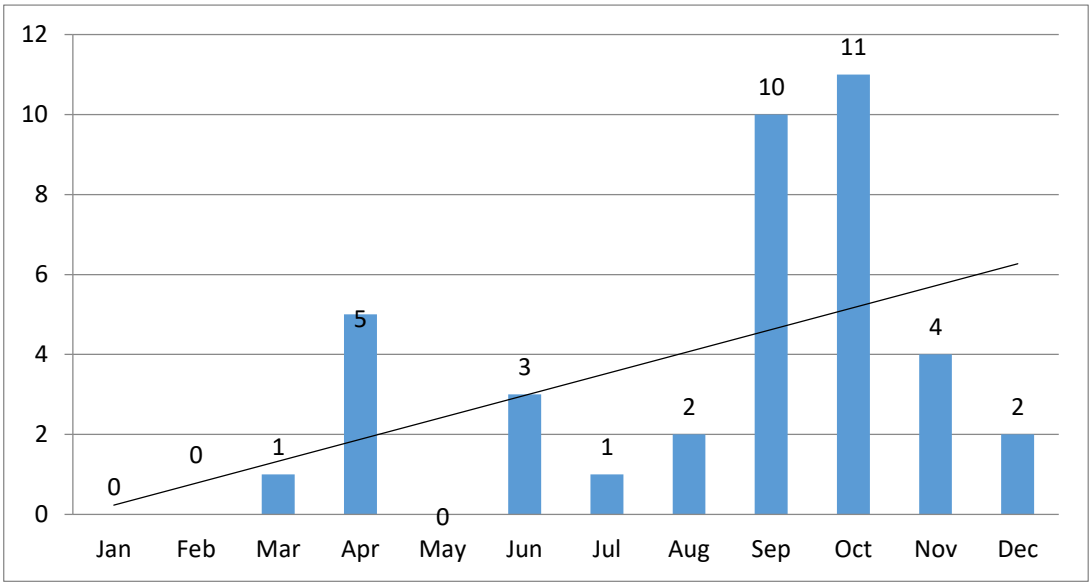

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Jumlah tindakan Audiometri RSUD Kota Yogyakarta pada periode Januari sampai dengan Desember 2021 cenderung mengalami peningkatan. Jumlah tindakan operasi tertinggi terjadi di bulan Oktober 2021.

Grafik 2.24
Perbandingan Jumlah Tindakan Audiometri
Periode: 2020 & 2021

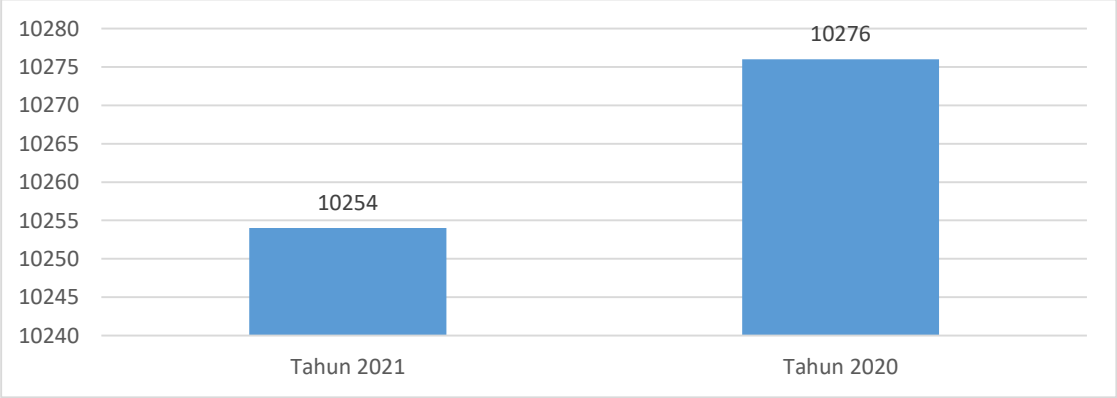

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Apabila dibandingan dengan tahun sebelumnya, Jumlah tindakan Hemodialisa pada periode tahun 2021 mengalami penurunan dengan prosentase sebesar 0.2%.

9. Pelayanan Kemoterapi

Grafik 2.25
Jumlah Tindakan Kemoterapi
Periode: Januari s.d. Desember 2021

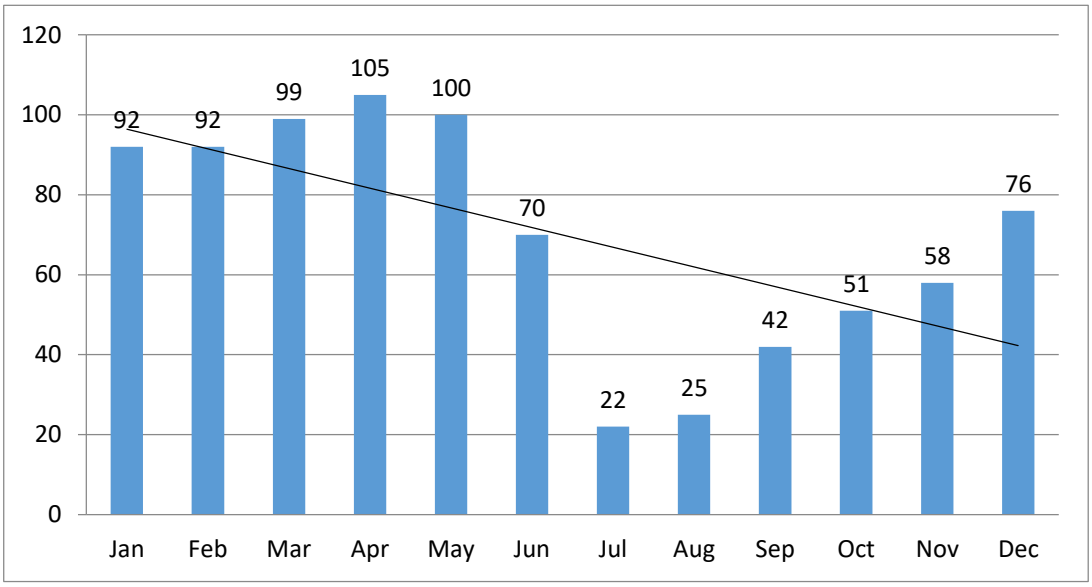

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Jumlah tindakan Kemoterapi RSUD Kota Yogyakarta pada periode Januari sampai dengan Desember 2021 cenderung mengalami penurunan. Jumlah tindakan kemoterapi tertinggi terjadi di bulan April 2021.

Grafik 2.26
Perbandingan Jumlah Tindakan Audiometri
Periode: 2020 & 2021

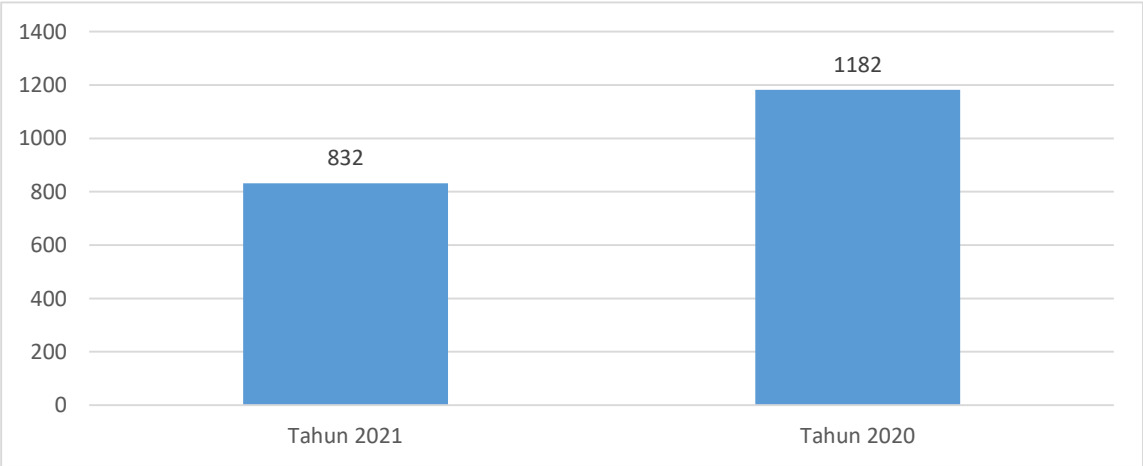

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Apabila dibandingan dengan tahun sebelumnya, Jumlah tindakan Kemoterapi pada periode tahun 2021 mengalami penurunan dengan prosentase sebesar 30%.

10. Pelayanan Cathlab

Grafik 2.27
Jumlah Tindakan Cathlab
Periode: Januari s.d. Desember 2021

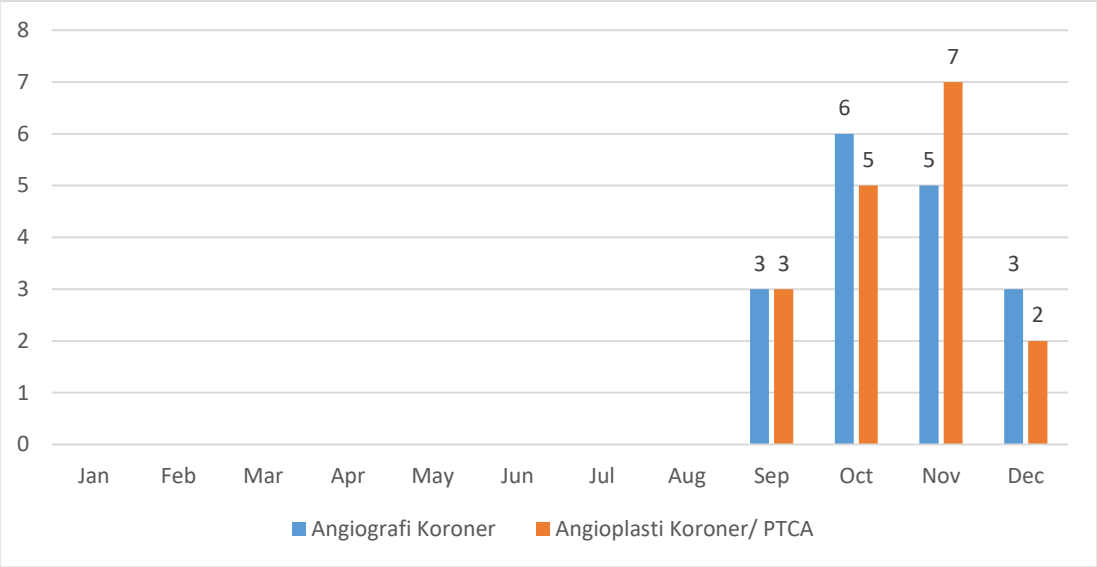

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Jumlah tindakan Cathlab meliputi tindakan Angiografi Koroner dan Angiolasti Koroner di RSUD Kota Yogyakarta dibuka pada bulan September 2021. Jumlah tindakan Cathlab tertinggi terjadi di bulan November 2021.

2. Pencapaian Kinerja Keuangan

RSUD Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta. Yang mana diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menjalankan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan. Fleksibilitas yang diberikan tersebut antara lain pengelolaan penerimaan pendapatan yang langsung dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional rumah sakit.

Berdasarkan data kunjungan pasien dan cara bayar tahun 2021 pendapatan Rumah Sakit masih didominasi penerimaan yang berasal dari pasien BPJS Kesehatan (JKN) dan dari pasien COVID-19 yang bersumber dari Kementerian Kesehatan RI. Maka dari itu kinerja penerimaan

pendapatan dipengaruhi oleh pembayaran klaim pasien BPJS Kesehatan (JKN) dan klaim pasien COVID-19. Sedangkan pembayaran dari pasien umum maupun penjaminan lainnya cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan peraturan perundangan terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan bahwa seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia diharuskan mengikuti program jaminan kesehatan nasional maupun jaminan ketenagakerjaan terhitung sejak tahun 2014. Presentase jumlah kunjungan pasien berdasarkan cara bayar tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Persentase Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Tahun 2021

Cara Bayar	Rawat Jalan	Rawat Inap	IGD
Umum	42,71%	14,59%	48,46%
JKN	42,87%	79,12%	44,53%
BPJS Ketenagakerjaan	0,12%	0,12%	0,46%
Jamkesda	0,14%	1,06%	0,49%
Jamkesos	0,66%	0,56%	0,33%
Kerjasama	0,03%	0,04%	0,07%
Lain-lain	13,46%	4,52%	5,65%

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, kunjungan pasien berdasarkan cara bayar pasien JKN masih menjadi urutan yang tertinggi untuk rawat jalan dan rawat inap, sedangkan di IGD pasien umum yang mempunyai persentase tertinggi.

Penerimaan pendapatan RSUD Kota Yogyakarta periode januari sampai dengan desember 2022 seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Laporan Pendapatan Tahun 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPPA	REALISASI S/D BULAN INI	LEBIH/ (KURANG)	%
4.1.4.17	**PENDAPATAN BLUD**				
4.1.4.17.01	**Jasa Layanan**	**89.067.285.900,00**	**104.439.299.110,00**	**15.372.013.210,00**	117%
	Klaim BPJS Kesehatan	37.378.000.000,00	40.417.361.326,00	3.039.361.326,00	108%
	Klaim BPJS Ketenagakerjaan	158.000.000,00	139.953.583,00	(18.046.417,00)	89%
	Klaim Jamkesos	252.800.000,00	330.416.533,00	77.616.533,00	131%
	Klaim Jamkesda Kota Yogyakarta	159.000.000,00	188.383.850,00	29.383.850,00	118%
	Klaim Jamkesda Kab. Bantul	33.000.000,00	169.011.159,00	136.011.159,00	512%
	Klaim Jasa Raharja	1.163.000.000,00	1.413.480.610,00	250.480.610,00	122%
	Klaim Penjaminan Lain	30.000.000,00	20.259.318,00	(9.740.682,00)	68%
	Pelayanan Pasien Umum	6.400.000.000,00	7.690.099.431,00	1.290.099.431,00	120%
	Pendapatan Diklit	219.000.000,00	287.529.100,00	68.529.100,00	131%
	Klaim Pasien Covid	43.274.485.900,00	53.782.804.200,00	10.508.318.300,00	124%
4.1.4.17.02	**Hibah**	**4.170.000,00**	**57.928.718,00**	**53.758.718,00**	1389%
4.1.4.17.03	**Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain**	**154.047.083,00**	**166.105.562,94**	**12.058.479,94**	108%
	Pemanfaatan Aset :				
	Lahan Parkir	34.845.000,00	31.045.000,00	(3.800.000,00)	89%
	Lahan Kantin	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100%
	Sewa Ruang ATM	51.000.000,00	47.250.000,00	(3.750.000,00)	93%
	Listrik & Laundry	7.059.200,00	14.937.900,00	7.878.700,00	212%
	Kerjasama Promosi Kesehatan	16.877.000,00	16.877.000,00	-	100%
	Kerjasama EDC	1.065.883,00	965.662,94	(100.220,06)	91%
	Pengolahan Limbah	18.200.000,00	30.030.000,00	11.830.000,00	165%
4.1.4.17.06	**Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah**	**985.817.000,00**	**1.138.711.078,88**	**152.894.078,88**	116%
	Jasa Giro	19.000.000,00	18.045.847,88	(954.152,12)	95%
	Bunga Deposito	936.000.000,00	1.072.833.338,00	136.833.338,00	115%
	Sewa Alat Peraga	200.000,00	200.000,00	-	100%
	Pengembalian Pegawai	-	3.359.893,00	3.359.893,00	0%
	Pengembangan Usaha	30.617.000,00	42.997.000,00	12.380.000,00	140%
	Lain - lain (Hadiah)		1.275.000,00	1.275.000,00	0%
	Jumlah	**90.211.319.983,00**	**105.802.044.469,82**	**15.590.724.486,82**	117%

Sumber : Laporan pendapatan RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

Pendapatan tahun 2021 yang paling besar berasal dari klaim pasien COVID-19 karena RSUD Kota Yogyakarta adalah salah satu Rumah Sakit rujukan COVID-19 di wilayah DIY dan seperti yang kita ketahui bahwa pandemi belum juga berakhir. Sedangkan penerimaan tertinggi kedua berasal dari klaim pasien BPJS Kesehatan (JKN). Penerimaan pendapatan tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan dalam DPPA Tahun Anggaran 2021, hal ini dikarenakan:

1. Klaim BPJS sudah lebih lancar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
2. Adanya peningkatan jumlah kunjungan pasien umum yang didominasi oleh pasien Medical Check Up.
3. Peningkatan jumlah pasien COVID-19.
4. Peningkatan jumlah pasien secara tidak langsung memberikan efek peningkatan pada penerimaan hasil kerjasama dengan pihak lain berupa laundry dan pengolahan limbah.

Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan tentang BLUD maka hasil penerimaan pendapatan sebagaimana diuraikan diatas, dapat langsung digunakan untuk membiayai operasional rumah sakit. Struktur biaya BLUD sesuai dengan ketentuan berbeda dengan struktur belanja pada perangkat daerah pada umumnya, namun untuk proses penyusunan anggaran maupun laporan realisasi biayanya dilakukan konversi ke jenis belanja sesuai struktur belanja untuk memudahkan konsolidasi. Rincian belanja tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

URAIAN	ANGGARAN DPPA (Rupiah)	REALISASI BELANJA S/D DESEMBER (Rupiah)	SISA ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE BELANJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**142.292.070.299,00**	**106.076.571.305,56**	**36.215.498.993,44**	**74,55%**
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.730.772.518,00**	**1.730.772.518,00**	**0,00**	**100.00%**
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**1.730.772.518,00**	**1.730.772.518,00**	**0,00**	**100,00%**
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**388.240.288,00**	**356.416.800,00**	**31.823.488,00**	**91,80%**
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**197.999.675,00**	**183.837.200,00**	**14.162.475,00**	**92,85%**
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	197.999.675,00	183.837.200,00	14.162.475,00	92,85%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**190.240.613,00**	**172.579.600,00**	**17.661.013,00**	**90,72%**
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	190.240.613,00	172.579.600,00	17.661.013,00	90,72%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**12.628.437.701,00**	**11.546.465.094,16**	**1.081.972.606,84**	**91,43%**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**2.332.200.000,00**	**1.940.476.543,00**	**391.723.457,00**	**83,20%**
Belanja Tagihan Telepon	150.000.000,00	93.166.769,00	56.833.231,00	62,11%
Belanja Tagihan Air	4.200.000,00	3.317.200,00	882.800,00	78,98%
Belanja Tagihan Listrik	1.938.000.000,00	1.609.241.655,00	328.758.345,00	83,04%
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	240.000.000,00	234.750.919,00	5.249.081,00	97,81%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**10.296.237.701,00**	**9.605.988.551,16**	**690.249.149,84**	**93,30%**
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.576.749.594,00	2.391.801.143,00	184.948.451,00	92,82%
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	235.884.247,00	233.556.999,00	2.327.248,00	99,01%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.825.603.860,00	4.513.650.615,00	311.953.245,00	93,54%
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.178.000.000,00	2.003.161.550,08	174.838.449,92	91,97%
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	480.000.000,00	463.818.244,08	16.181.755,92	96,63%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.586.555.000,00**	**1.545.870.147,40**	**40.684.852,60**	**97,44%**

URAIAN	ANGGARAN DPPA (Rupiah)	REALISASI BELANJA S/D DESEMBER (Rupiah)	SISA ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE BELANJA
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**66.555.000,00**	**53.155.462,00**	**13.399.538,00**	**79,87%**
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	66.555.000,00	53.155.462,00	13.399.538,00	79,87%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**1.520.000.000,00**	**1.492.714.685,40**	**27.285.314,60**	**98,20%**
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.320.000.000,00	1.293.599.685,40	26.400.314,60	98,00%
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	200.000.000,00	199.115.000,00	885.000,00	99,56%
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	**125.958.064.792,00**	**90.897.046.746,00**	**35.061.018.046,00**	**72,16%**
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	**125.958.064.792,00**	**90.897.046.746,00**	**35.061.018.046,00**	**72,16%**
Belanja Pegawai BLUD	56.971.129.156,00	41.242.966.391,00	15.728.162.765,00	72,39%
Belanja Barang dan Jasa BLUD	57.486.935.636,00	42.106.155.702,00	15.380.779.934,00	73,24%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.000.000.000,00	2.661.152.721,00	2.338.847.279,00	53,22%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.000.000.000,00	3.320.606.932,00	679.393.068,00	83,02%
Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi	1.100.000.000,00	746.075.000,00	353.925.000,00	67,83%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.400.000.000,00	820.090.000,00	579.910.000,00	58,58%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**19.495.891.538,00**	**16.902.482.854,00**	**2.593.408.684,00**	**86,70%**
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**19.165.891.538,00**	**16.655.826.854,00**	**2.510.064.684,00**	**86,90%**
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	**200.000.000,00**	**198.602.000,00**	**1.398.000,00**	**99,30%**
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	200.000.000,00	198.602.000,00	1.398.000,00	99,30%
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**2.363.999.538,00**	**1.541.520.660,00**	**822.478.878,00**	**65,21%**
Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	2.000.000.000,00	1.264.209.487,00	735.790.513,00	63,21%
Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	363.999.538,00	277.311.173,00	86.688.365,00	76,18%
Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	**7.848.000.000,00**	**7.194.218.567,00**	**653.781.433,00**	**91,67%**
Belanja Obat-Obatan-Obat	7.848.000.000,00	7.194.218.567,00	653.781.433,00	91,67%
Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	**5.788.478.000,00**	**5.751.123.585,00**	**37.354.415,00**	**99,35%**
Belanja Bahan-Bahan Kimia	378.750.000,00	378.689.140,00	60.860,00	99,98%
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	57.500.000,00	57.150.000,00	350.000,00	99,39%
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.169.530.000,00	5.133.018.441,00	36.511.559,00	99,29%
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	182.698.000,00	182.266.004,00	431.996,00	99,76%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**2.965.414.000,00**	**1.970.362.042,00**	**995.051.958,00**	**66,44%**
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	585.414.000,00	523.350.285,00	62.063.715,00	89,40%
Belanja Jasa Kalibrasi	600.000.000,00	467.415.600,00	132.584.400,00	77,90%
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	600.000.000,00	333.560.717,00	266.439.283,00	55,59%

URAIAN	ANGGARAN DPPA (Rupiah)	REALISASI BELANJA S/D DESEMBER (Rupiah)	SISA ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE BELANJA
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	190.000.000,00	175.726.950,00	14.273.050,00	92,49%
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	790.000.000,00	412.434.990,00	377.565.010,00	52,21%
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi	200.000.000,00	57.873.500,00	142.126.500,00	28,94%
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**330.000.000,00**	**246.656.000,00**	**83.344.000,00**	**74,74%**
Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	**78.000.000,00**	**46.786.000,00**	**31.214.000,00**	**59,98%**
Belanja Modal Personal Komputer (touchscreen)	15.000.000,00	11.800.000,00	3.200.000,00	78,67%
Belanja Modal Personal Komputer lainnya	63.000.000,00	34.986.000,00	28.014.000,00	55,53%
Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	**252.000.000,00**	**199.870.000,00**	**52.130.000,00**	**79,31%**
Belanja Modal Personal Komputer (all in one)	252.000.000,00	0,00	252.000.000,00	0,00%
	161.787.961.837,00	**122.979.054.159,56**	**38.808.907.677,44**	**76,01%**

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan RSUD Kota Yogyakarta tahun 2021

3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah

Kinerja pelayanan daerah dapat dilihat dari pencapaian indikator sasaran dan indikator program RSUD Kota Yogyakarta sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra (RSB) BLUD RSUD Kota seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A.	Indikator Sasaran :											
1	Hasil Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna		Lulus Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna	
B.	Indikator Program :											
1	Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun			8%	12%	60%	-	13,60%	23,70%	60%	-	
2	Persentase sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan			80%	81%	82%	84,10%	82,35%	81,50%	82,00%	84,10%	
3	Jumlah modul Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)			22 Modul	24 Modul	26 Modul	-	22 Modul	24 Modul	26 Modul	-	
4	Presentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal			-	-	80%	80,25%	-	-	80%	80,25%	
5	Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS			-	-	-	80%	-	-	-	80%	
6	Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan			-	-	-	80%	-	-	-	80%	
7	Persentase Tata Kelola Rumah Sakit yang mendukung skor akreditasi			-	-	-	80%	-	-	-	80%	
8	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat			-	-	A (Nilai 80-90)	A (Nilai 80-90)	-	-	A (Nilai 80-90)	A (Nilai 80-90)	
9	Persentase pelayanan sarana dan prasarana, kepegawaian dan hukmas terpenuhi			-	-	-	100%	-	-	-	100%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah tidak terlepas dari tantangan, hambatan dan permasalahan yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Tantangan, hambatan dan permasalahan tersebut dirangkum dalam isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Penentuan Layanan Unggulan Rumah Sakit.

   Layanan unggulan dalam sebuah rumah sakit merupakan suatu magnet atau daya tarik tersendiri bagi pasien untuk menentukan pilihannya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk menentukan layanan unggulan dalam sebuah rumah sakit, harus dipertimbangkan tentang kelangkaan layanan ini, di mana rumah sakit lain di sekitar tidak memiliki atau minim. Selain itu perlu dipersiapkan berbagai hal dari mulai fisik alat kesehatan maupun pendukungnya berupa sarana prasarana dan SDM sehingga pelayanan yang dilakukan akan dapat berjalan optimal. RSUD Kota Yogyakarta memiliki tantangan cukup berat mengingat banyaknya rumah sakit pesaing yang ada di wilayah sekitar yang telah memiliki layanan unggulan. Sudah saatnya RSUD Kota Yogyakarta mempertimbangkan potensi kunjungan pasien umum non JKN yang bisa dimaksimalkan dengan daya tarik dari layanan unggulan ini.

2. Sistem rujukan berjenjang.

   Sistem pelayanan kesehatan berjenjang sesuai ketentuan pelaksanaan BPJS dapat membatasi cakupan pelayanan kesehatan (kasus lanjut) RSUD Kota Yogyakarta. Sebagai RS kelas B; pasien BPJS hanya dapat dilayani apabila ada rujukan dari fasilitas kesehatan di bawahnya walaupun secara akses lebih dekat ke RSUD Kota Yogyakarta. Penerapan system P-Care yang dilakukan BPJS Bidang Kesehatan semakin mempersempit akses pasien untuk berobat ke RSUD Kota Yogyakarta karena akan ditapis sesuai sistem dengan hanya dapat dilayani oleh RS dengan kelas dibawah RSUD Kota Yogyakarta.

3. Pembenahan sarana prasarana.

   Sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang akan mendukung tercapainya tujuan rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Salah satu contoh adalah gedung yang dimiliki RS sering diadakan rehab baik ruangan atau bangunan. Tujuannya adalah untuk perbaikan layanan dan kenyamanan pasien. Diperlukan satu pembangunan yang baik, kuat dan tepat guna agar rehab ruang dan gedung dapat diminimalisir. Di samping itu kondisi bangunan yang sebagian besar sudah masuk kategori bangunan tua sehingga membutuhkan perhatian serius, layout bangunan yang ada saat ini tidak terpadu dan kurang komprehensif, sehingga kurang efisien dan efektif untuk dijangkau baik pengunjung maupun karyawan. Oleh karena itu pada tahun 2021 RSUD Kota Yogyakarta telah melakukan penyusunan reviu Master Plan dengan harapan untuk

memperbaiki tampilan gedung dan memaksimalkan fungsi bangunan agar efektif dan efisien untuk pengunjung dan karyawan Rumah Sakit.

4. Pengadaan alat kesehatan yang memadai dan sesuai standar Rumah Sakit kelas B Pendidikan.

   Sebagai Rumah Sakit kelas B, alat kesehatan yang dimiliki mempunyai standar tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit. Demikian juga diperlukan perencanaan yang matang untuk pemeliharaan atau pembaruan untuk alat kesehatan yang dimiliki agar tetap optimal dalam memberikan pelayanan. RSUD Kota Yogyakarta ditetapkan menjadi RS Rujukan Regional melalui Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0363/2015 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan provinsi dan Rumah sakit Rujukan Regional, dengan adanya hal tersebut RSUD Kota Yogyakarta diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar. Kebijakan penunjukan RS Rujukan Regional dari sisi pemenuhan anggaran untuk pemeliharaan alat sudah memadai, namun dari sisi regulasi harusnya diiringi dengan regulasi yang mengarahkan rujukan ke tipe RS yang lebih tinggi melalui RSUD Kota Yogyakarta sebagai RS Rujukan Regional. Akan tetapi penetapan RSUD Kota Yogyakarta sebagai RS Rujukan Regional sedang dalam proses pengkajian ulang oleh Kementerian Kesehatan, sehingga RSUD Kota Yogyakarta harus bersiap apabila tidak lagi menjadi RS Rujukan Regional.

5. Promosi kesehatan.

   Perlu upaya yang lebih optimal dalam melakukan promosi tentang layanan Rumah Sakit kepada masyarakat luas agar lebih dikenal dan mampu mengubah persepsi masyarakat bahwa Rumah Sakit milik pemerintah juga mempunyai layanan yang tidak kalah dengan Rumah Sakit swasta.

6. Telah ditetapkannya RSUD Kota Yogyakarta sebagai RS Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2020 - 2023. Paradigma bahwa fungsi pendidikan akan mengganggu pelayanan dan kenyamanan pasien di rumah sakit harus dapat disingkirkan dengan tetap mengutamakan kualitas mutu layanan dan keselamatan pasien.

7. Sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan adanya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan. RSUD Kota Yogyakarta merupakan unit Organisasi Bersifat Khusus (OBK) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dan kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Hal ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan/kebijakan secara langsung khususnya dalam penanganan kasus medis, disamping juga kemungkinan adanya tumpang tindih pelaksanaan operasional oleh karena

penyatuan fungsi regulasi dan fungsi operator (pelaksana). RSUD dengan kelembagaan yang besar, SDM banyak, anggaran besar dan lingkup pelayanan yang kompleks, apabila berada di bawah Dinas Kesehatan berpotensi menyebabkan birokrasi yang lebih panjang, jika belum ada rentang kendali koordinasi yang komprehensif. Oleh karena itu fungsi Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan harus dikendalikan langsung secara otonomi oleh RSUD Kota Yogyakarta. Sementara itu Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta diharapkan berperan dalam fungsi regulator (kebijakan).

8. Adanya Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 51 Tahun 2018, tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan. Saat ini yang berlaku adalah penerapan selisih biaya, sedangkan urun biaya belum diterapkan. Sementara itu, peraturan tersebut belum disosialisasikan secara detail dan komprehensif agar dipahami dan dimengerti oleh publik.
9. Ditetapkannya masa tanggap darurat oleh pemerintah karena munculnya pandemi besar yang melanda hampir seluruh negara-negara di dunia pada tahun 2020, yaitu Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Indonesia sendiri termasuk negara yang cukup besar terkena dampak Pandemi Covid-19 dimana telah menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menuntut layanan kesehatan di berbagai daerah di Indonesia untuk dapat menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menangani pasien Covid-19, terutama pada rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai rumah sakit rujukan pasien Covid-19. RSUD Kota Yogyakarta sendiri telah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk menangani pasien COVID-19 sehingga dalam pengembangan pelayanan RSUD Kota Yogyakarta harus sigap menyediakan fasilitas yang dapat menunjang perawatan pasien Covid-19.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Belanja dan Anggaran (RBA) RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023. Sekaligus merujuk pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang mengarah pada koridor pembangunan Kota Yogyakarta. Sehingga program dan kegiatan yang direncanakan oleh RSUD Kota Yogyakarta untuk dilaksanakan pada tahun 2023 ini untuk mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan bidang kesehatan di daerah Kota Yogyakarta terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

RSUD Kota Yogyakarta

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**RSUD Kota Yogyakarta**	**Persentase Tata Kelola Rumah Sakit Yang Mendukung Skor Akreditasi**	**80%**	**112.746.584.520**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**RSUD Kota Yogyakarta**	**Persentase Tata Kelola Rumah Sakit Yang Mendukung Skor Akreditasi**	**80%**	**112.746.584.520**	
			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	**A (Nilai>80 s.d 90)**				**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A% (Nilai>80 s.d 90)**		
			Persentase pelayanan sarana dan prasarana, kepegawaian dan hukmas terpenuhi	**100%**				**Persentase pelayanan sarana dan prasarana, kepegawaian dan hukmas terpenuhi**	**100%**		
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	6.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	6.000.000	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	6.000.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	6.000.000	
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	-	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	-	
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	450.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	450.000.000	
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	14.208.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	14.208.000.000	
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	2.093.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	2.093.000.000	
1.7	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD			100%	95.983.584.520	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD			100%	95.983.584.520	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**RSUD Kota Yogyakarta**	**Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Penunjang Medis Dan Non Medis Yang Terpelihara Dan Dapat Dioperasionalkan Secara Optimal**	**80,25%**	**38.547.000.000**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**RSUD Kota Yogyakarta**	**Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Penunjang Medis Dan Non Medis Yang Terpelihara Dan Dapat Dioperasionalkan Secara Optimal**		**38.547.000.000**	
			Presentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Sesuai Standar RS Rujukan Regional Kelas B Pendidikan	**84,10%**				**Presentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Sesuai Standar RS Rujukan Regional Kelas B Pendidikan**			
			Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	**80%**				**Persentase Instrumen Mutu Asuhan Keperawatan**			
			Persentase Instrumen Mutu Asuhan Keperawatan	**80%**				**Persentase Instrumen Mutu Asuhan Keperawatan**			
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			100%	38.200.000.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			100%	38.200.000.000	
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota			2 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota			2 Dokumen	50.000.000	
2.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			20 Unit	297.000.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			20 Unit	297.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Kementerian Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian kesehatan Tahun 2020-2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu:

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi;
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda;
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit;
4. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
5. Penguatan sistem kesehatan.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai pondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia (human capital). Paradigma Sehat menyasar pada:

1) Penentu kebijakan pada lintas sektor, untuk memperhatikan dampak kesehatan dari kebijakan yang diambil baik dari hulu maupun di hilir
2) Tenaga kesehatan, yang mengupayakan agar orang sehat tetap sehat atau tidak menjadi sakit, orang sakit menjadi sehat dan orang sakit tidak menjadi lebih sakit
3) Institusi kesehatan, yang diharapkan penerapan standar mutu dan standar tarif dalam pelayanan kepada masyarakat
4) Masyarakat, yang merasa kesehatan adalah harta berharga yang harus dijaga.

Dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 memuat 8 sasaran strategis yang salah satunya adalah meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta adalah salah satu Rumah Sakit Rujukan di wilayah Kota Yogyakarta yang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kota Yogyakarta dengan klasifikasi RS Tipe B Pendidikan. Sesuai Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit,

Rumah Sakit adalah institusi atau organisasi perangkat daerah, pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk tahun 2005-2025, visi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah "Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, Yang Berwawasan lingkungan". Dari visi tersebut dijabarkan menjadi misi yang salah satunya adalah "Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat" dengan tujuan "Terwujudnya Kota Yogyakarta Yang Sehat Dengan Harapan Hidup Meningkat". Dari aspek kesehatan, pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, sehingga tercipta peningkatan umur harapan hidup masyarakat.

Sebagai pelaksanaan dari visi Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Kota Yogyakarta; maka ditetapkan tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Yogyakarta melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Walikota Yogyakarta No 15 tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 8 dan Pasal 9 sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Rumah Sakit mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan pencegahan penyakit (preventif), upaya peningkatan promosi kesehatan (promotif), melaksanakan upaya rujukan kesehatan dan melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 8, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mempunyai tugas sebagai :
   a) menyelenggarakan pelayanan medis paripurna;
   b) menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
   c) menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
   d) menyelenggarakan pelayanan rujukan;

e) menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan;

f) menyelenggarakan pelayanan penelitian dan pengembangan;

g) menyelenggarakan penapisan teknologi bidang kesehatan;

h) menyelenggarakan pelayanan administrasi dan keuangan rumah sakit;

i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

RSUD mempunyai fungsi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan serta pelaksanaan administrasi kesehatan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Tahun 2023 ini disusun berdasarkan pada RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dan Renstra (Rencana Strategis) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dengan penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Target kinerja indikator program tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target Kinerja Indikator Program Tahun 2023

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	HASIL PROGRAM	
	TOLOK UKUR	TARGET
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Tata Kelola Rumah Sakit Yang Mendukung Skor Akreditasi	80%
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai>80 s.d 90)
	Persentase pelayanan sarana dan prasarana, kepegawaian dan hukmas terpenuhi	100%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Penunjang Medis Dan Non Medis Yang Terpelihara Dan Dapat Dioperasionalkan Secara Optimal	80,25%
	Presentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Sesuai Standar RS Rujukan Regional Kelas B Pendidikan	84,10%
	Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	80%
	Persentase Instrumen Mutu Asuhan Keperawatan	80%

Sedangkan tabel target kinerja indikator kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target Kinerja Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		
Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tesedianya alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan
Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat dan vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan
Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Sarana di Fasilitas Pelayanan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan jaringan Internet	Tersedianya Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) tahunan disusun berdasarkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Yogyakarta tahun 2023 dan Renstra BLUD RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai visi jangka menengah daerah. Penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah merupakan suatu serangkaian kegiatan dengan penyusunan RKPD, dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Rumusan program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2023 sesuai yang telah di entry dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**150,747,039,730**					**144,888,360,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**112,572,039,730**					**120,061,360,000**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**5,998,000**					**6,000,000**
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	A Nilai	5 Dokumen	100 %	5,998,000	Pajak Daerah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	A Nilai	6,000,000
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**6,000,000**					**6,000,000**
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	A Nilai	12 Laporan	100 %	6,000,000	Pajak Daerah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	A Nilai	6,000,000
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**3,000,000**					**3,000,000**
1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	A Nilai	3 Dokumen	100 %	3,000,000	Pajak Daerah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	A Nilai	3,000,000
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**448,455,610**					**470,000,000**
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	A Nilai	1 Paket	100 %	199,810,000	Pajak Daerah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	A Nilai	207,000,000
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	A Nilai	2 Paket	100 %	248,645,610	Pajak Daerah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	A Nilai	263,000,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**14,072,601,600**					**14,922,000,000**
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	A Nilai	12 Laporan	100 %	2,671,200,000	Pajak Daerah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	A Nilai	2,806,000,000
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	A Nilai	12 Laporan	100 %	11,401,401,600	Pajak Daerah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	A Nilai	12,116,000,000
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,052,400,000**					**2,205,000,000**
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	A Nilai	3 Unit	100 %	41,000,000	Pajak Daerah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	A Nilai	79,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	A Nilai	11 Unit	100 %	89,400,000	Pajak Daerah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	A Nilai	101,000,000
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	A Nilai	200 Unit	100 %	120,000,000	Pajak Daerah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	A Nilai	132,000,000
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	A Nilai	1 paket	100 %	1,802,000,000	Pajak Daerah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	A Nilai	1,893,000,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**95,983,584,520**					**102,449,360,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Operasional BLUD Rumah Sakit terpenuhi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Terpenuhinya Operasional Pelayanan BLUD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	100 %	1 Unit Kerja	100 %	95,983,584,520	Pendapatan dari BLUD		Operasional BLUD Rumah Sakit terpenuhi	100 %	102,449,360,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**38,175,000,000**					**24,827,000,000**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**37,800,000,000**					**24,450,000,000**
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	80,25 % 80 %	1 Unit	100 %	2,600,000,000	Pajak Daerah		Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	80,25 % 80 %	200,000,000
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	80,25 % 80 %	1 paket	100 %	4,200,000,000	Pajak Daerah DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan		Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	80,25 % 80 %	500,000,000
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	80,25 % 80 %	11 paket	100 %	17,500,000,000	Pajak Daerah DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan		Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	80,25 % 80 %	10,000,000,000
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Yogyakarta,	80,25 % 80 %	2 paket	100 %	7,000,000,000	Pajak Daerah		Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan	80,25 % 80 %	6,600,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS		untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Umbulharjo, Sorosutan							Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS		
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	80,25 % 80 %	2 paket	100 %	4,000,000,000	Pajak Daerah		Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	80,25 % 80 %	4,400,000,000
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	80,25 % 80 %	13 paket	100 %	2,500,000,000	Pajak Daerah		Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	80,25 % 80 %	2,750,000,000
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**50,000,000**					**50,000,000**
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	80 %	2 dokumen	100 %	50,000,000	Pajak Daerah		Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan	80 %	50,000,000
1 02 02 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**								**325,000,000**					**327,000,000**
1 02 02 2.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	80 %	9 unit	100 %	325,000,000	Pajak Daerah		Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan	80 %	327,000,000
								TOTAL	**150,747,039,730**					**144,888,360,000**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 RSUD Kota Yogyakarta ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan rencana kerja dengan program dan kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) RSUD Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan; dan sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan demi terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan di tahun-tahun mendatang yang lebih baik sehingga mampu menjadi Rumah Sakit yang dapat memenuhi tuntutan masyarakat khususnya di era jaminan kesehatan nasional serta dapat mempertahankan status sebagai Rumah Sakit rujukan regional yang mampu memberikan pelayanan kesehatan bermutu dan biaya terjangkau dengan kinerja profesional.

Yogyakarta, 22 MAR 2022
Direktur RSUD Kota Yogyakarta

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

dr. Ariyudi Yunita, MMR
NIP. 19670626 200212 2 003